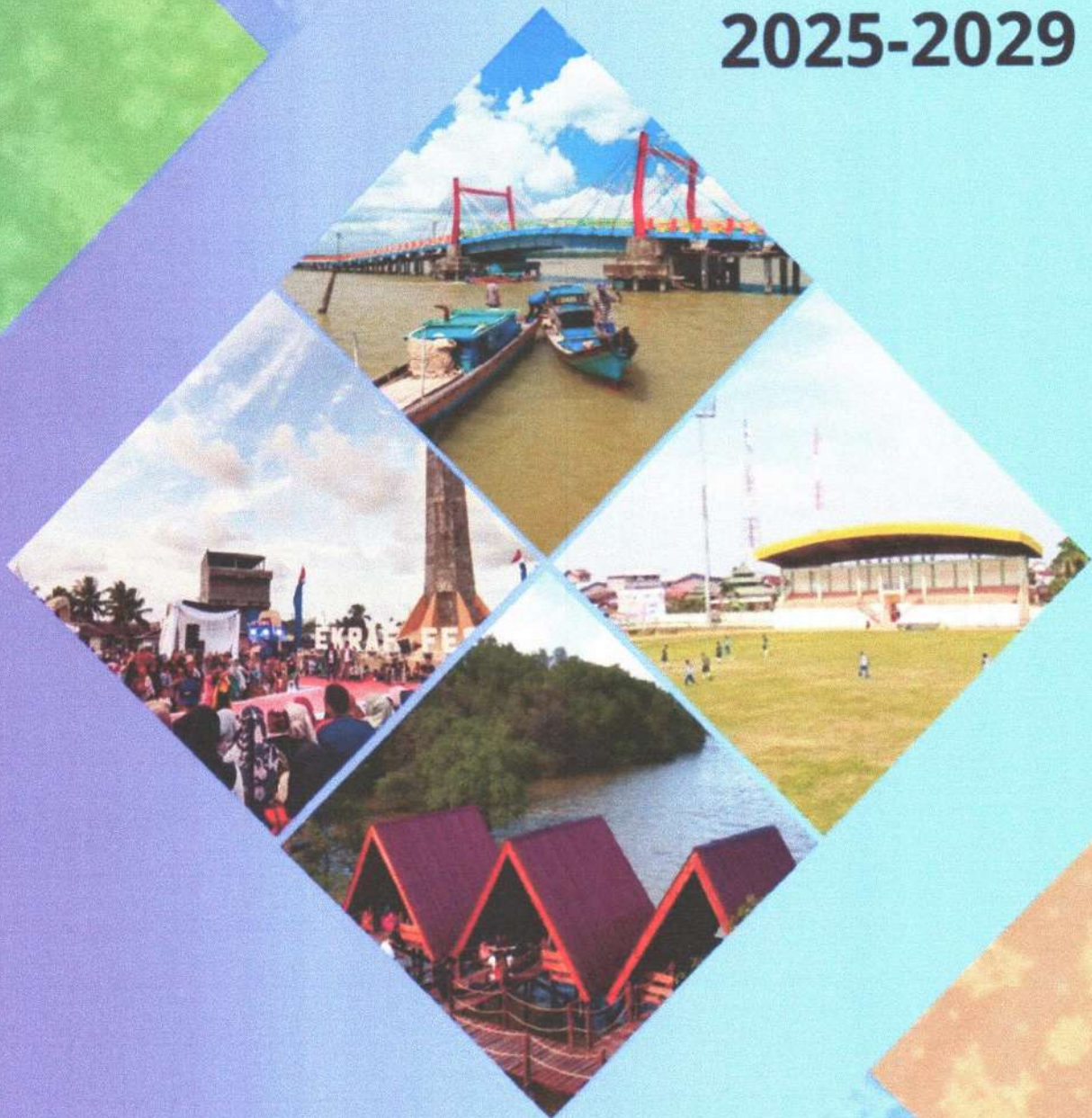


**RANCANGAN AKHIR**

# **RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS**

**2025-2029**



**DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2030 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai arah kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Renstra ini disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memperhatikan perkembangan isu global, nasional, dan lokal yang relevan. Penyusunannya dilakukan secara terintegrasi dan partisipatif, dengan tetap memperhatikan potensi unggulan daerah serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter generasi muda, pelestarian budaya, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga memegang peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “Berkah Madani”. Renstra ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan menjadi panduan yang bermanfaat dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Kuala Tungkal, 2025  
Plt. Kepala Dinas Parpora  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**L. ANGSORI, S.Ag.,MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197004141998031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum.....	7
1.3    Maksud dan Tujuan.....	10
1.4    Sitematika Penulisan.....	12
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT.....	14



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat identitas budaya, serta membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya lokal yang khas, serta potensi demografis pemuda yang cukup besar.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah di pesisir timur Provinsi Jambi yang dikaruniai berbagai kekayaan sumber daya alam, budaya, serta sumber daya manusia yang beragam. Dengan karakteristik wilayah yang unik terdiri atas kawasan pesisir, rawa, sungai, dan hutan mangrove, kabupaten ini memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, serta penguatan identitas budaya lokal. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya diolah dan dikembangkan secara maksimal.

Di bidang pariwisata, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti Kawasan Mangrove Pangkal Babu, wisata religi, dan wisata susur sungai yang menawarkan pengalaman ekowisata dan wisata budaya. Keindahan alam dan kekayaan hayati yang dimiliki juga menjadi nilai jual tersendiri. Namun, pengembangan pariwisata masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur pendukung (akses jalan, akomodasi, fasilitas wisata), rendahnya promosi yang bersifat digital dan kreatif, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata.

Sementara itu, sektor kebudayaan memiliki peranan vital dalam memperkuat identitas dan karakter masyarakat daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kekayaan budaya yang hidup dalam masyarakat, seperti tari-tarian tradisional, syair, adat perkawinan Melayu Jambi, permainan rakyat, serta ekspresi seni lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, masih terbatasnya pembinaan bagi pelaku seni budaya, minimnya ruang pertunjukan, serta belum adanya sistem dokumentasi dan digitalisasi budaya menyebabkan warisan budaya lokal rentan mengalami degradasi dan kehilangan generasi penerus.



Di sisi lain, ekonomi kreatif (ekraf) merupakan sektor yang sangat potensial untuk digerakkan, terutama karena kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja muda dan menciptakan nilai tambah berbasis inovasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif di Tanjung Jabung Barat berpeluang besar tumbuh dalam subsektor kuliner, kriya, desain, seni pertunjukan, fashion, fotografi serta produk-produk digital. Sayangnya, sektor ini belum berkembang optimal karena masih menghadapi kendala seperti minimnya pendampingan usaha kreatif, terbatasnya fasilitas produksi dan promosi, serta lemahnya integrasi antara sektor ekraf dan kebijakan pembangunan daerah. Dukungan sistemik dan kolaboratif antar OPD serta sinergi dengan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjadikan ekraf sebagai pilar ekonomi baru.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pemuda memiliki posisi strategis sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kekuatan besar yang harus dimanfaatkan melalui penguatan kapasitas, karakter, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemuda masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses terhadap pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan, kurangnya wadah ekspresi yang produktif, serta rendahnya partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan pemuda harus ditempatkan sebagai prioritas lintas sektor guna memastikan keberlanjutan pembangunan.

Olahraga, sebagai sarana pembentukan karakter, kesehatan masyarakat, dan penciptaan prestasi, juga belum berkembang secara maksimal. Meskipun antusiasme masyarakat terhadap olahraga cukup tinggi, pengembangan sektor ini masih dihambat oleh minimnya infrastruktur olahraga yang representatif, kurangnya kompetisi berjenjang, serta belum terbentuknya sistem pembinaan atlet daerah secara profesional. Selain itu, olahraga juga memiliki potensi ekonomi melalui sport tourism dan industri olahraga yang belum tergarap dengan baik.

Kelima sektor strategis tersebut sesungguhnya memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pariwisata tidak dapat berkembang tanpa dukungan budaya yang kuat. Ekraf yang sukses adalah yang mampu mengangkat nilai-nilai lokal dan identitas budaya. Pemuda merupakan aktor utama dalam inovasi dan regenerasi pelaku budaya, kreatif, serta atlet berprestasi. Sementara itu, olahraga berkontribusi dalam pembentukan karakter generasi muda yang sehat, tangguh, dan kompetitif.



Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu mengintegrasikan potensi, permasalahan, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan adaptif.

Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja. Renstra menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun Fungsi RENSTRA:

- Mengarahkan program dan kegiatan pembangunan sektoral.
- Meningkatkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.
- Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) perangkat daerah.
- Alat evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah.
- Instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Penyusunan Renstra ini disusun untuk menjalankan amanat dari peraturan dan regulasi perencanaan dan kelembagaan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD.

Dalam upaya menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, penting untuk memahami kondisi strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara komprehensif. Kondisi strategis ini mencerminkan situasi aktual yang dihadapi oleh setiap bidang urusan, baik dari sisi potensi, tantangan, maupun hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Analisis kondisi ini menjadi dasar bagi penentuan arah kebijakan, perumusan strategi, dan penyusunan program pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Berikut ini disajikan kondisi strategis masing-masing bidang urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas:



1) Pariwisata

- Potensi wisata alam seperti pantai, hutan mangrove, dan kawasan pesisir belum dikembangkan secara optimal;
- Masih minimnya kerja sama dengan pihak swasta dan desa wisata;
- Kelemahan dalam sistem digitalisasi promosi wisata dan kurangnya SDM pariwisata yang profesional.

2) Ekonomi Kreatif

- Produk lokal masih dominan berbasis tradisional dan belum memiliki daya saing pasar nasional;
- Inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan ekraf masih terbatas;
- Belum terdapat basis data dan peta potensi subsektor ekonomi kreatif yang akurat.

3) Kebudayaan

- Kegiatan pelestarian budaya masih bersifat seremonial, belum sistematis;
- Risiko hilangnya tradisi dan bahasa lokal akibat kurangnya dokumentasi dan regenerasi;
- Kurangnya pengelolaan cagar budaya dan aset budaya tak benda

4) Kepemudaan

- Akses keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih terbatas pada kegiatan formal;
- Tingginya angka pengangguran usia muda dan rendahnya partisipasi dalam organisasi produktif;
- Belum tersedia mekanisme pembinaan kewirausahaan dan inovasi pemuda berbasis teknologi

5) Olahraga

- Sarana olahraga yang belum merata dan tidak memenuhi standar pembinaan prestasi;
- Kegiatan keolahragaan masih dominan bersifat partisipatif, belum kompetitif;
- Rendahnya pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan.

Penyusunan RENSTRA ini sangat strategis karena akan menjadi:

- Landasan bagi pembangunan sektor strategis yang mendukung peningkatan ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat.



- Pendorong integrasi lintas bidang, karena sektor pariwisata, ekraf, budaya, pemuda, dan olahraga saling berkaitan dalam pembentukan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Instrumen reformasi birokrasi, karena mendorong perencanaan berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
- Arahkan investasi dan kolaborasi antar-stakeholder (pemerintah, swasta, komunitas) dalam pengembangan potensi daerah.
- Dasar pelaporan kinerja tahunan, yang terukur dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Visi Kepala Daerah, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”, yang merupakan akronim dari: Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan Inovatif. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. BERKAH dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. BERKAH dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. BERKAH dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota.

Sinkronisasi antara Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Asta Cita Pembangunan Daerah dan Asta Cita Presiden.

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM  
Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pemuda dan olahraga sangat selaras dengan cita-cita pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Nasional, khususnya poin ke-4 yang menargetkan peningkatan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pengembangan pemuda, pembinaan olahraga, dan pelatihan kepemudaan menjadi kunci dalam menciptakan generasi unggul yang produktif dan kompetitif.
2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)  
Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mengarah pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Ini mendukung cita-cita pembangunan daerah yang



mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pengembangan sektor unggulan, seperti pariwisata. Dalam konteks nasional, hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 yang menekankan pada pembangunan ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, serta pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat.

### 3. Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal

Program pelestarian budaya oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mendukung tujuan daerah untuk meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat. Ini juga berkaitan dengan Asta Cita Nasional poin ke-1 dan ke-7, yakni memperkokoh ideologi Pancasila dan mewujudkan keadilan sosial melalui pelestarian budaya dan lingkungan. Pelestarian budaya tidak hanya menjaga jati diri bangsa, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui sektor budaya kreatif.

### 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Ini konsisten dengan arah pembangunan daerah yang ingin menciptakan pemerintahan yang baik. Di tingkat nasional, hal ini sangat sinkron dengan Asta Cita ke-6 menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berbasis digital sebagai fondasi pelayanan publik yang modern.

Secara umum, Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Jabung Barat sudah selaras baik dengan visi dan misi kepala daerah maupun Asta Cita Nasional. Sinergi ini menunjukkan bahwa kebijakan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Dalam konteks ini, Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga sebagai komitmen kolektif untuk mengarahkan pembangunan daerah yang holistik, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menjalankan strategi pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipatif.

Dengan adanya integrasi sektor pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga ke dalam perencanaan strategis daerah, maka Kabupaten



Tanjung Jabung Barat memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam jati diri budaya, berdaya saing global, dan sejahtera secara sosial.

Melalui Renstra yang komprehensif ini, diharapkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga dapat saling bersinergi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas budaya, serta menciptakan kesempatan bagi generasi muda dalam mencapai potensi terbaik mereka, sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **1.2 Landasan hukum**

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 6055);
  7. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang – undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 198 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 199 Tahun 2024 Tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 200 Tahun 2024 Tentang badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 397);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 187 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam PPN/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun



- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk:



1. Memberikan arah dan pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga secara terintegrasi dan sistematis selama periode 2025–2029;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk kebijakan sektoral yang operasional, yang dapat dilaksanakan secara konkret dalam bidang pariwisata, ekraf, budaya, pemuda, dan olahraga;
3. Mengintegrasikan perencanaan sektoral dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional, seperti RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Asta Cita Nasional, guna memastikan keselarasan arah pembangunan di semua tingkatan;
4. Mengidentifikasi dan merespons tantangan aktual serta potensi strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi kreatif, dan pembinaan olahraga;
5. Menjadi landasan teknis dan administratif dalam pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi secara periodik.
6. Mendorong tata kelola organisasi yang lebih adaptif, responsif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance dan dinamika kebutuhan masyarakat di era digital dan kompetitif saat ini.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan strategi jangka menengah untuk pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan;
2. Merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, realistis, dan relevan untuk digunakan sebagai dasar evaluasi capaian pembangunan sektor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Memperkuat sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak, baik antar OPD, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas lokal, maupun masyarakat umum, dalam membangun sektor-sektor unggulan daerah secara partisipatif;



4. Mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, termasuk sumber daya alam, budaya, kreativitas masyarakat, serta demografi pemuda, sebagai modal dasar pembangunan daerah yang mandiri dan berdaya saing;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembinaan masyarakat dalam bidang pariwisata, budaya, kreatif, kepemudaan, dan olahraga, melalui program-program yang inklusif, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat;
6. Memastikan keberlanjutan program dan kegiatan strategis dengan memperkuat aspek kelembagaan, perencanaan berbasis data, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu;
7. Menjadi instrumen penyeimbang antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga pembangunan sektor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistic.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat disusun sebagai berikut:

- **BAB I : Pendahuluan**  
Terdiri dari Latar belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- **BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
  - Memuat informasi tentang pelayanan perangkat daerah:
    - Tugas dan Fungsi OPD
    - Sumber Daya PD
    - Kinerja Pelayanan PD
    - Kelompok Sasaran Layanan
  - Memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- **BAB III : Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan**  
Memuat mengenai tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra tahun 2025 – 2029.
- **BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**



- Terdiri atas uraian program, kegiatan dan sub kegiatan berserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif;
- Memuat tentang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA melalui Indikator Kerja Utama (IKU) dan IKK Perangkat Daerah .

➤ **BAB V : PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 menjadi dasar hukum pembentukan dan penataan perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan pelaksanaannya, Perbup 25 Tahun 2023 mengalami perubahan yang menegaskan penyesuaian nomenklatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga guna mengakomodasi perluasan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dan kebudayaan.

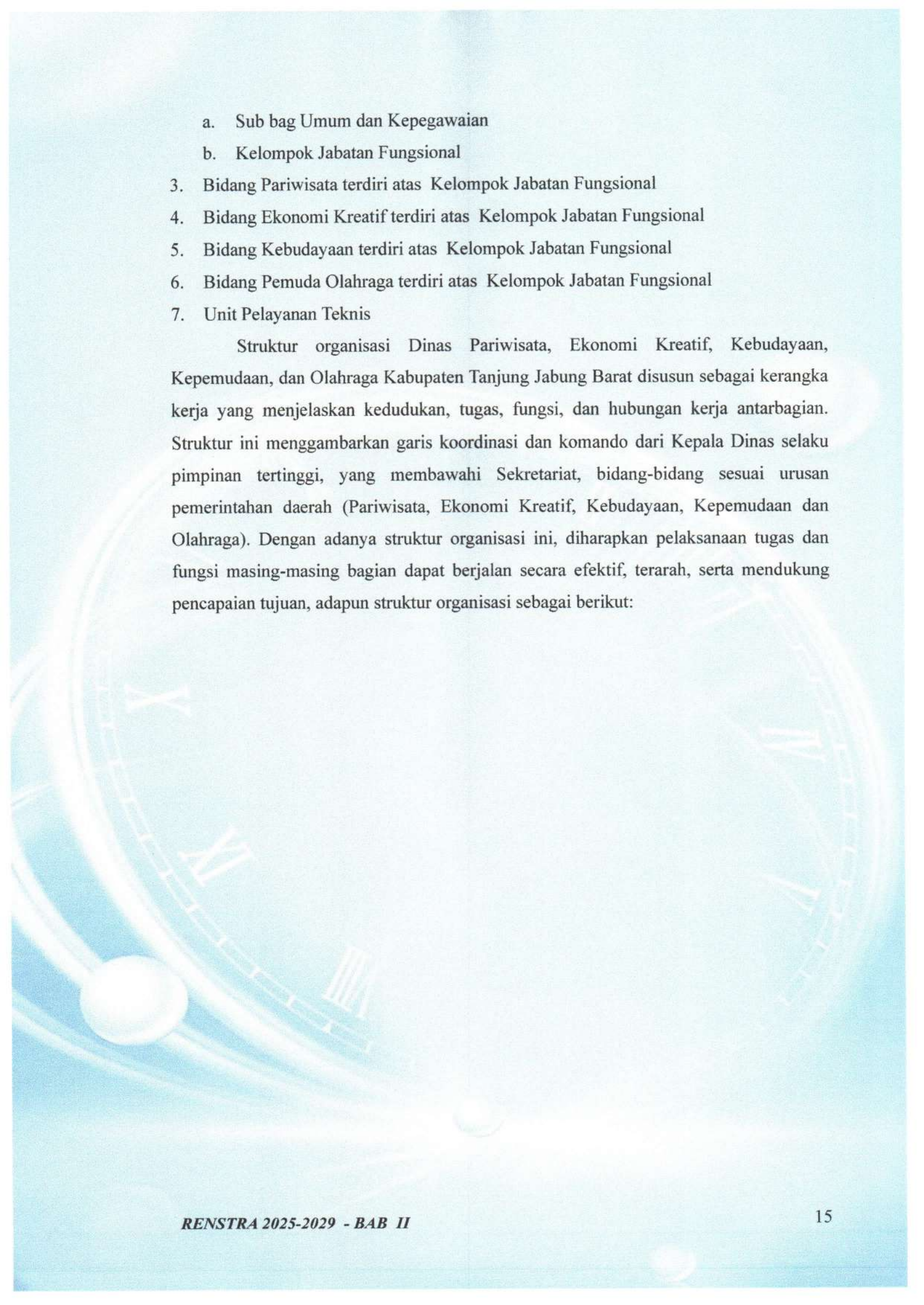
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata, Ekonomi kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga menyelenggarakan fungsi.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada. Struktur ini dirancang agar dapat menjalankan tugas secara efisien, terkoordinasi, dan berbasis pada pelayanan publik yang optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh satuan organisasi. Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas



- 
- a. Sub bag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  4. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  5. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  6. Bidang Pemuda Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  7. Unit Pelayanan Teknis

Struktur organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sebagai kerangka kerja yang menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, dan hubungan kerja antarbagian. Struktur ini menggambarkan garis koordinasi dan komando dari Kepala Dinas selaku pimpinan tertinggi, yang membawahi Sekretariat, bidang-bidang sesuai urusan pemerintahan daerah (Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga). Dengan adanya struktur organisasi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat berjalan secara efektif, terarah, serta mendukung pencapaian tujuan, adapun struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas PAREKRAFBUDPORA  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat





Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Disparpora sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan bidang kepemudaan dan Olahraga; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (lhp);
- d) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan dan ketatalaksanaan. fungsi:

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d) Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- f) Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.



### 3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata di bidang Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pariwisata;
- b) Penyiapan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengembangan destinasi wisata termasuk sarana dan prasarana pariwisata, serta daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
- c) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemasaran, promosi, dan kerja sama pariwisata di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- d) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, jasa usaha pariwisata, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Bidang Ekonomi Ekraf

Bidang Ekonomi Ekraf berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ekonomi Ekraf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata di bidang Ekonomi Ekraf.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program serta rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengembangan subsektor ekonomi kreatif sesuai potensi daerah;
- c) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, termasuk kemitraan dan jejaring usaha;
- d) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, baik secara konvensional maupun digital; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program serta rencana kerja di bidang kebudayaan;
- 2) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;
- 3) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pelestarian warisan budaya tak benda, termasuk sejarah lokal dan tradisi masyarakat;



- 4) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan komunitas dan lembaga adat, penguatan kapasitas pelaku seni-budaya serta promosi dan pemanfaatan hasil kebudayaan; dan
  - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, peningkatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kepemudaan dan Olahraga;
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;
- c) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah saat ini, dilakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah. Penyesuaian ini merupakan kelanjutan dari Perubahan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah diberlakukan



sebelumnya. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang menyiapkan perubahan lanjutan atas peraturan tersebut untuk menyesuaikan nomenklatur dan memperluas cakupan urusan sesuai tantangan dan peluang terkini. Pada tahun 2025 akan ada perubahan lanjutan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga akan diubah menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, sehingga tugas dan fungsi perangkat daerah dapat menjangkau pengembangan ekonomi kreatif yang sebelumnya belum menjadi bidang urusan tersendiri serta memperkuat layanan pada sektor kebudayaan dan pariwisata yang semakin strategis.

Penyusunan Renstra periode 2025 -2029 akan ada penyesuaian atas perubahan tersebut, berimplikasi pada penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah, yang secara langsung memengaruhi jenis serta cakupan pelayanan publik yang diberikan. Penambahan urusan ekonomi kreatif, bidang yang sebelumnya belum menjadi kewenangan dinas bersama dengan kebudayaan memungkinkan perluasan layanan yang kini meliputi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, termasuk integrasi program kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, meliputi pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku ekraf, pelestarian nilai budaya, pemberdayaan pemuda, dan peningkatan prestasi olahraga.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dalam mendukung penyelenggaraan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru, termasuk kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan daerah maupun kepemudaan dan olahraga.



## 2.1.2 Sumber daya

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kualitas, kompetensi, dan ketersediaan SDM yang memadai akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kab. Tanjab Barat sumber daya manusia belum memadai. Walaupun dengan kondisi tersebut diharapkan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kualitas, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai (PNS/CPNS/P3K) sejumlah 17 orang. Dengan porsi 4 orang berada di jajaran struktural dan 8 orang JFT dan 5 orang pegawai fungsional umum. Melihat dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PARPORA sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi pada khususnya Dinas PARPORA mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorer. Tenaga honorer tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan seperti, penyanyi juga pemain music dengan memperbantukan tenaga Honorer atau Pegawai tidak tetap sebanyak 27 Orang termasuk tenaga kebersihan/lapangan .

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Esel II	Esel III	Esel IV	Ahli Muda	Ahli Pertama	Staf / JFU	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	0
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	2



4	Kassubag /JFT	-	-	1	5	-	-	6
5	Staf Pelaksana /Fungsional Umum	-	-	-	-	8	-	8
6	TKK/Penjaga Lapangan	-	-	-	-	-	27	27
	Jumlah	1	2	1	5	8	27	44

Keterangan : Kondisi sampai dengan Juni 2025

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	0	-	-	-	-	0
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	2
4	Kassubag/JFT	-	4	1	1	-	-	6
5	Staf Pelaksana /Fungsional Umum Pelaksana/Fungsional Umum	-	5	-	3	-	-	8
6	TKK/Penjaga lapangan	-	11	-	11	3	2	27
	Jumlah	1	22	1	15	3	2	44

Keterangan : Kondisi sampai dengan Juni 2025

#### 2.1.2.2 Sumber Dana

Untuk menunjang kegiatan Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ketahun. Berikut adalah jumlah alokasi anggaran Disparpora dari Tahun 2021-2024.

Tabel 2.3  
Alokasi Anggaran Disparpora dari Tahun 2021-2024

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2021	13.209.464.173,00	12.414.376.096,00	93,98



2	2022	13.727.196.525,00	12.882.976.326,00	93,85
3	2023	26.465.546.023,00	25.757.518.898,00	97,32
4	2024	30.345.630.633,00	28.376.529.686,00	93,51

#### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya. Sarana dan Prasarana Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Tahun/ Perolehan
1	Tanah	1	Aset DPRD
2	Bangunan	1	2023
3	Ruang Kantor	9	2023
4	Ruang Rapat	1	2013 (Rehab)
5	Ruang Penyimpanan Alat Musik	1	2018 (Rehab)
6	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Inova (2012), Terios (2012), Hilux (2013), Innova dan Suzuki Carry (2024)
7	Kendaraan Dinas (Motor)	11	1 unit 2006, 1 unit 2007 , 1 Unit 2010, 2 Unit 2011, 1 Unit 2012, 4 Unit 2013 dan 6 unit 2024
8	Komputer	18	2 unit 2015, 4 Unit 2017, 1 Unit 2018, 4 Unit 2019, 2 Unit 2020, 4 Unit 2021, 1 Unit 2023 dan 2 unit 2024
9	Laptop	19	5 Unit 2013, 2 Unit 2017, 4 Unit 2018, 2 Unit 2019, 3 Unit 2020, 1 Unit 2021 dan 2 unit 2023
10	Printer	17	1 Unit 2013, 2 Unit 2015, 3 Unit 2017, 2 Unit 2018, 2 Unit 2019, 2 Unit 2020, 2 Unit 2021, 3 Unit 2023, 3 unit 2024



11	AC	15	1 Unit 2011, 2 Unit 2012, 5 Unit 2013, 1 Unit 2017, 2 Unit 2018, 2 Unit 2019, 2 Unit 2020 dan 2 unit 2024
12	Telepon	1	2014 (Fax)
13	Meja Kerja	31	3 Unit 2011, 10 Unit 2013, 6 Unit 2014, 5 Unit 2015, 1 Unit 2021 dan 6 unit 2023
14	Kursi Kerja	85	
	- Kursi Putar & Kursi Rapat		6 Unit 2016, 9 Unit 2017 dan 43 Unit
	-Kursi Kayu		3 Unit 2011, 10 Unit 2013, 6 Unit 2014, 5 Unit 2015, 3 Unit 2021
15	Lemari Arsip	21	3 Unit 2013, 6 Unit 2014, 5 Unit 2015, 2 Unit 2017, 4 Unit 2019 dan 1 Unit 2023
16	Filling Kabinet	10	1 Unit 2006, 1 Unit 2012, 6 Unit 2013, 2 Unit 2014
17	UPS	5	1 Unit 2013, 1 Unit 2014, 2 Unit 2015 dan 1 Unit 2021
18	Genset	1	1 Unit tahun 2019

*Keterangan : Kondisi sampai dengan triwulan I Tahun 2025*

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Renstra Periode 2020-2024

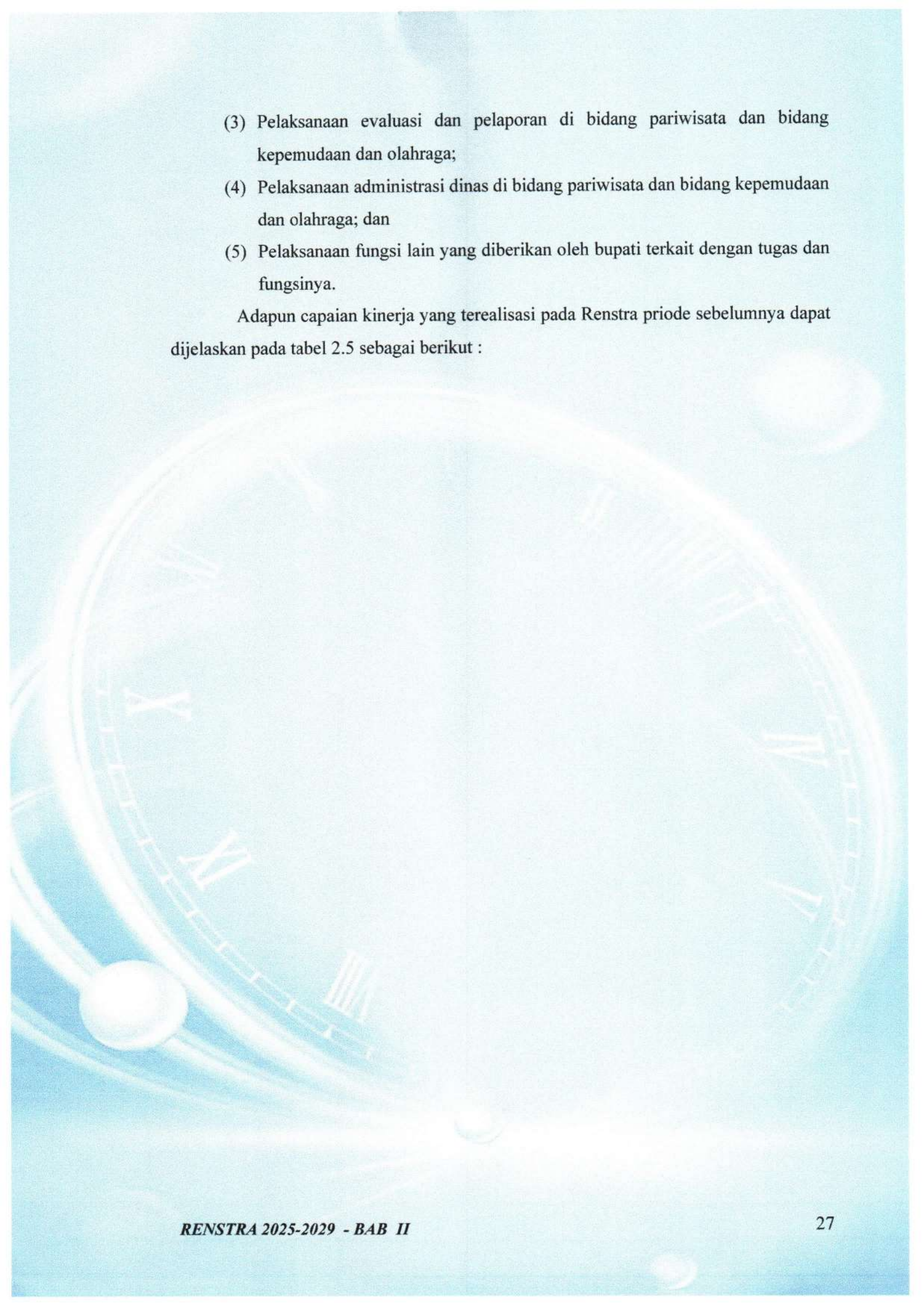
Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu Urusan Kepariwisata, Urusan Kepemudaan dan Urusan Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Maka jenis pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;



- 
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - (4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
  - (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun capaian kinerja yang terealisasi pada Renstra priode sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel 2.5 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata				10%	30%	35%	40%	45%	225,99%	32%	137,46%	186%		2259,90%	107%	392,74%	465,00%	
2	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di LUZ					10%	10%	20%	30%		50%	100%	100%			500%	1000,00%	500,00%	
3	Persentase SDM Pariwisata Berkompeten yang Dibina				7%	12%	17%	20%	23%	5%	43%	25%	41%		71,43%	348%	147,06%	205,00%	
4	Persentase Pemuda Berprestasi / Mandiri / Religius yang Dibina				20%	45%	45%	49%	49%	18%	62%	8%	37%		90,00%	138%	17,78%	75,51%	
5	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional/ Regional				40 Medali	6 Medali	15 Medali	9 Medali	10 Medali	51 Medali	46 Medali	62 Medali	21 Medali		128%	767%	413%	233%	



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat beberapa kinerja mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun ke 1 naik cukup signifikan.

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan yang tercatat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan ini dapat dijelaskan dengan melihat perubahan dalam metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur jumlah kunjungan wisatawan. Sebelumnya, data yang digunakan hanya mengacu pada jumlah tamu hotel yang menginap, yang merupakan indikator yang terbatas. Namun, pada tahun 2021, sistem pengumpulan data diperluas dengan mencakup jumlah kunjungan ke destinasi wisata selain hanya mengandalkan data tamu hotel. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan memasukkan data kunjungan ke destinasi wisata, bukan hanya tamu hotel, Disparpora dapat lebih memahami profil wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat, seperti penentuan jenis atraksi wisata yang lebih diminati atau peningkatan fasilitas umum di destinasi yang banyak dikunjungi.

Selain itu pada tahun 2021 menjadi tahun pemulihan bagi sektor pariwisata di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah pembatasan yang diberlakukan selama 2020 akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata mulai dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menyebabkan lebih banyak wisatawan yang mulai kembali berkunjung ke destinasi wisata, meskipun dengan pembatasan tertentu. Kunjungan ke tempat-tempat wisata alam mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun masih ada protokol yang berlaku.

Pada tahun selanjutnya strategi yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur di bidang pariwisata mulai memberikan hasil yang positif. Pengembangan aksesibilitas menuju destinasi wisata melalui perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, keberadaan hotel dan kehadiran beberapa home stay lebih bervariasi memberi



pilihan yang lebih baik bagi wisatawan dalam hal akomodasi, yang turut berperan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Transformasi digital telah menjadi pilar utama sekaligus katalisator penting dalam memodernisasi strategi promosi pariwisata, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada masa lalu, promosi pariwisata di kabupaten ini lebih banyak mengandalkan metode konvensional. Beberapa strategi yang digunakan meliputi penyebaran brosur dan pamflet, pemasangan iklan di media cetak, keikutsertaan dalam pameran pariwisata, kampanye lewat poster dan banner, penyampaian informasi melalui agen perjalanan, serta relasi dengan media massa. Bahkan, terdapat pendekatan unik seperti menjadikan wisatawan sebagai duta promosi, di mana pengalaman positif wisatawan diharapkan menjadi alat pemasaran dari mulut ke mulut. Meskipun pendekatan tersebut cukup efektif pada masanya, keterbatasannya mulai terasa dalam aspek jangkauan audiens, biaya operasional, serta kecepatan dan konsistensi informasi. Perubahan perilaku wisatawan yang kini lebih bergantung pada informasi digital mengharuskan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan pola konsumsi informasi baru.

Dengan perkembangan teknologi, kini promosi pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat beralih ke platform digital, baik melalui website resmi, media sosial, maupun media digital lainnya yang menawarkan berbagai kemudahan dalam hal distribusi informasi. Misalnya, platform berita online seperti lintastungkal.com, detiktravel.com, dan jambione.com, telah membantu menyebarkan informasi destinasi wisata di Tanjung Jabung Barat secara lebih luas dan cepat.

Namun, meskipun media digital semakin mendominasi, media cetak dan video promosi tetap memainkan peran yang tidak bisa diabaikan dalam menciptakan citra yang kuat dan memperkenalkan daya tarik pariwisata daerah ini. Pemanfaatan fotografi dan video elektronik promosi destinasi serta video promosi kuliner Tanjung Jabung Barat semakin memperkaya pengalaman promosi dan memperluas jangkauan audiens.

Transformasi digital memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data yang tersedia menunjukkan adanya peningkatan yang sangat tajam dalam jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 49.822 orang, yang kemudian meningkat menjadi 65.520 orang pada



tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan 155.581 orang yang mengunjungi daerah ini, dan pada tahun 2024, jumlah kunjungan mencapai 444.474 orang, yang mana di lihat pada grafik berikut :



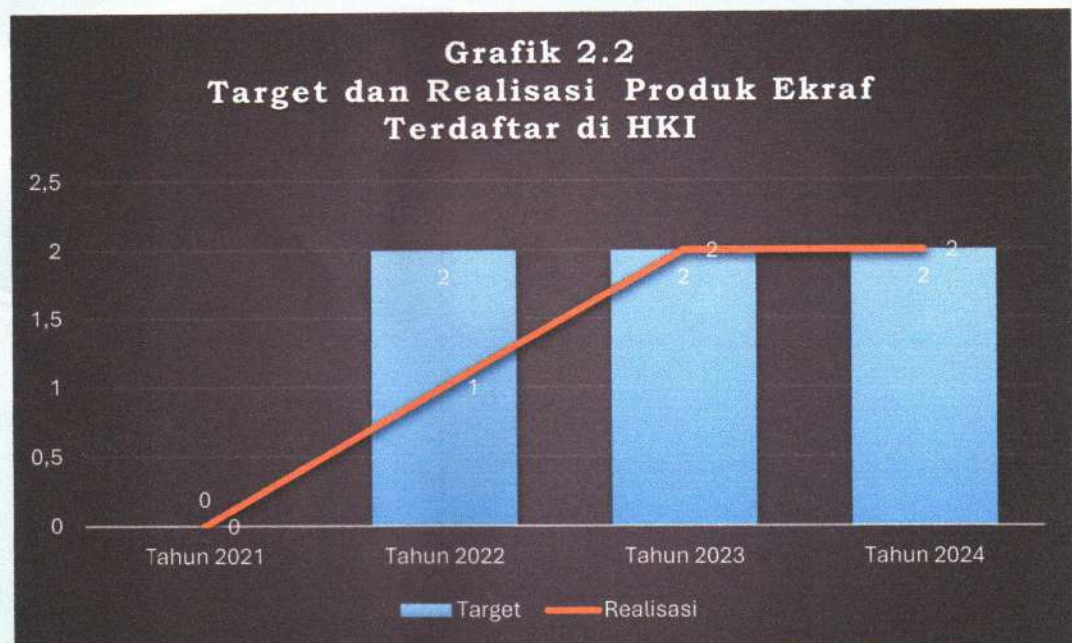
- b. Persentase produk ekraf yan terdaftar di HKI, dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sesuai rencana dimana setiap tahun sebanyak 2 (dua) produk ekonomi kreatif (ekraf) dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhasil terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberhasilan ini patut diapresiasi, meskipun jumlahnya masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan potensi besar sektor ekonomi kreatif yang ada. Meskipun jumlahnya masih terbatas, langkah ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menjaga keunikan dan ciri khas produk mereka. Keberhasilan ini seharusnya menjadi contoh dan motivasi bagi pelaku ekraf lainnya untuk melanjutkan proses pendaftaran produk mereka di HKI. Dengan meningkatnya pemahaman dan dukungan terhadap proses ini, diharapkan lebih banyak produk ekraf dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat terdaftar di HKI dan berpotensi untuk berkembang lebih luas di pasar lokal dan global.



Adapun Capaian Kinerja dari tahun 2021 s.d tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Tahun 2021 belum ada target ;
- 2) Tahun 2022 merupakan tahun pertama kegiatan terkait Ekraf. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 50% (1 Produk Ekraf) dari target 2 Produk Ekraf;
- 3) Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% (2 Produk Ekraf) dari target 2 Produk Ekraf;
- 4) Tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% (2 Produk Ekraf) dari target 2 Produk Ekraf.

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan pada grafik berikut:



c. Persentase SDM Pariwisata Berkompeten yang Dibina

Pada sektor pariwisata, keberhasilan dalam mengembangkan potensi destinasi sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam hal ini, keberhasilan tercapainya persentase SDM pariwisata berkompeten yang dibina menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

Salah satu alasan mengapa persentase SDM pariwisata yang berkompeten dapat tercapai adalah karena adanya peningkatan program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kepemudaan (Disparpora), serta lembaga terkait lainnya. Program



pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh Disparpora atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan profesional memberikan kesempatan kepada tenaga kerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Penyediaan kursus dan sertifikasi di bidang kepariwisataan memberikan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Adanya sertifikasi ini memberi pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki oleh para pelaku pariwisata, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan capaian kinerja pada table 2.5, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



- d. Persentase Pemuda Berprestasi / Mandiri / Religius yang Dibina yang capaiannya berfluktuasi.

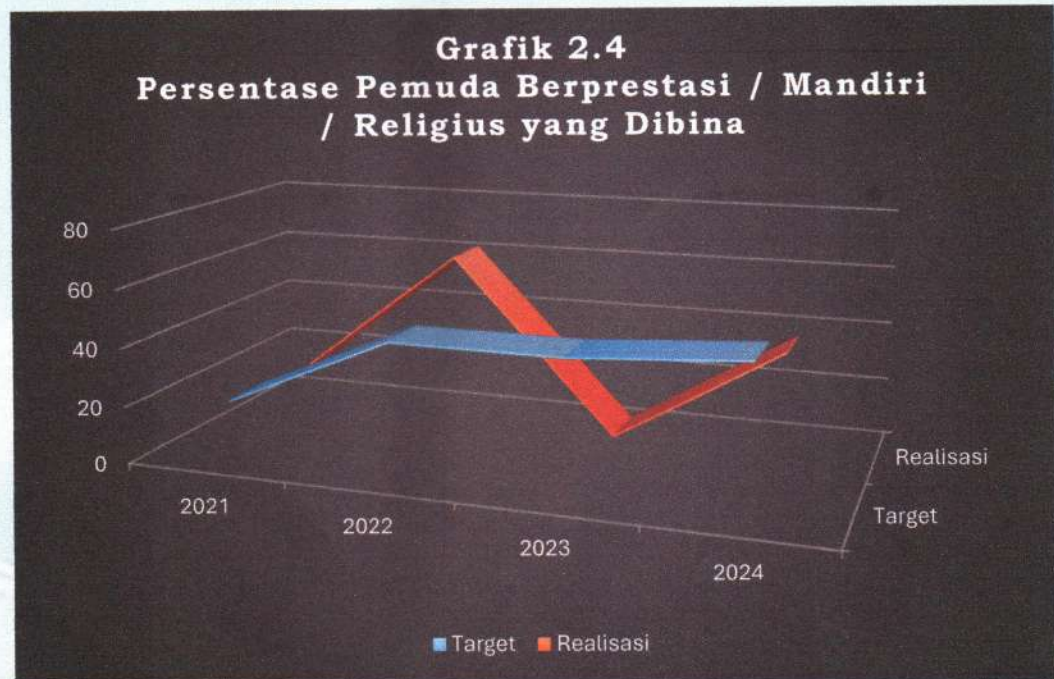
Pencapaian yang berfluktuasi dalam persentase pemuda berprestasi, mandiri, dan religius yang dibina di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diartikan sebagai dinamika dalam program pembinaan dan pengembangan generasi muda di daerah tersebut. Fluktuasi ini, meskipun terkadang bisa menunjukkan adanya kemajuan di beberapa bidang, juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencetak pemuda yang berprestasi, mandiri, dan religius secara konsisten.

Fluktuasi dalam pencapaian program ini bisa terjadi karena diversitas dan kompleksitas aspek yang harus diperhatikan dalam setiap program. Meskipun



programnya sudah dijalankan, hasil yang diinginkan tidak selalu konsisten setiap tahun karena adanya faktor eksternal yang berpengaruh.

Berdasarkan capaian kinerja pada table 2.5, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



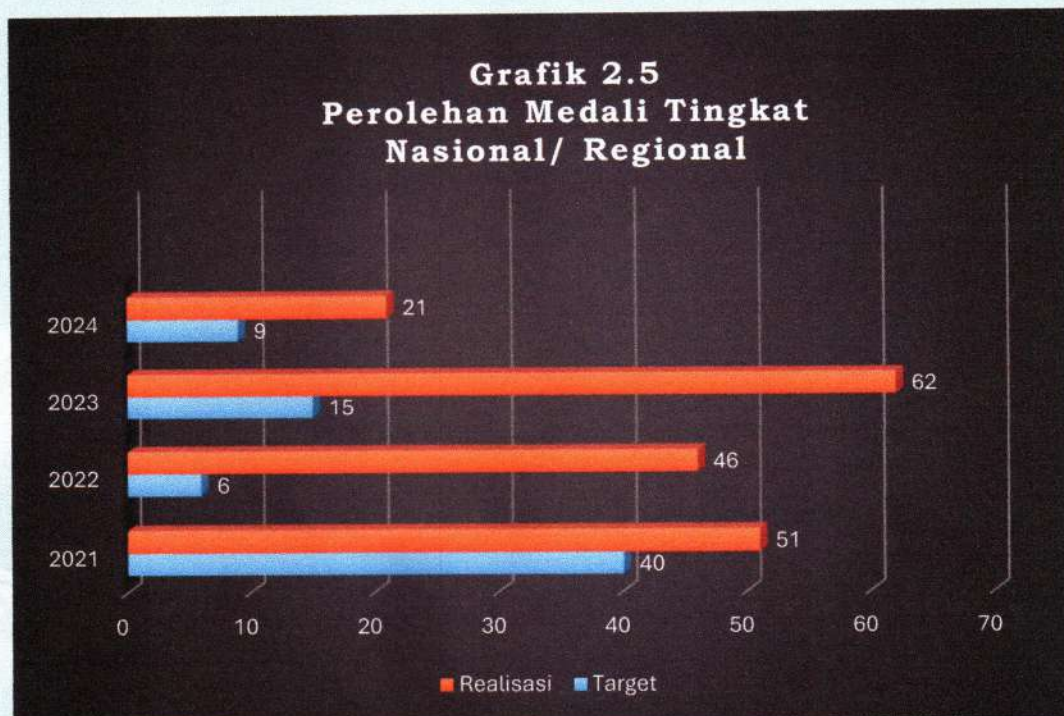
e. **Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional/ Regional**

Pelaksanaan pemusatan latihan (TC) menjadi bagian penting dalam proses pembinaan, terutama menjelang keikutsertaan dalam ajang seperti Porprov, POPDA, dan Kejurnas. Latihan dilakukan secara intensif dengan pendampingan pelatih bersertifikasi. Selain itu, peningkatan kapasitas pelatih juga menjadi fokus melalui pelatihan teknis dan kerja sama dengan KONI dan cabor. Di sisi lain, pemerintah daerah memberikan perhatian dalam bentuk insentif dan penghargaan bagi atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Sarana dan prasarana olahraga pun terus diperbaiki dan dioptimalkan penggunaannya untuk mendukung kualitas latihan. Tak kalah penting, kolaborasi dengan KONI, komunitas olahraga, dan mitra swasta juga ikut memperkuat pembinaan, baik dari sisi teknis maupun dukungan pendanaan. Hasil dari berbagai upaya tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah medali yang diraih setiap tahun serta partisipasi atlet Tanjab Barat dalam ajang regional hingga nasional. Selain itu, pembinaan ini juga berhasil mencetak regenerasi atlet muda berbakat, memperkuat ekosistem olahraga prestasi daerah,



serta meningkatkan citra Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah yang aktif dan berdaya saing dalam bidang olahraga.

Berdasarkan capaian kinerja pada table 2.5, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Adapun anggaran dan realisasi pada RENSTRA periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Uraian / Program	Anggaran Pada Tahun 2021 - 2024				Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021 - 2024				Rasio Antara Realisasi dan				Rata - Rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.377.760.604	3.846.662.636	4.688.967.654	7.335.689.560	2.894.932.920	3.440.605.934	4.548.916.630	6.755.168.739	86	89	97	92	31	33
2	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan	559.908.222	811.037.248	390.103.900	801.384.600	511.949.594	687.248.548	329.648.000	756.667.300	91	85	85	94	33	37
3	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Keolahragaan	6.560.866.571	6.052.437.165	17.977.790.905	17.646.622.613	6.326.311.882	5.875.553.172	17.677.653.347	16.393.217.166	96	97	98	93	62	62
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	400.000.000	370.309.136	342.201.450	450.317.000	100	93	86	90	8	6
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.242.933.776	2.026.095.778	1.632.163.500	2.750.107.660	2.213.186.700	1.985.440.919	1.611.061.891	2.735.068.241	99	98	99	99	13	14
6	Program Pemasaran Pariwisata	39.730.000	380.729.950	367.150.000	460.366.000	39.730.000	322.156.300	309.362.500	440.851.040	100	85	84	96	293	250
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		69.030.000	851.693.864	719.086.200		67.680.000	835.616.080	714.736.200		98	98	99	373	373
8	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	28.265.000	141.203.748	157.676.200,00	132.374.000	28.265.000	133.986.308	148.059.000	130.504.000	100	95	94	99	132	124



#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki cakupan layanan yang sangat luas dan lintas sektor. Hal ini dikarenakan dinas ini menjalankan tugas-tugas strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan potensi daerah, pelestarian nilai budaya, dan pembinaan generasi muda serta olahraga prestasi dan rekreasi.

Karena lingkup urusannya yang kompleks dan multidimensi, maka kelompok sasaran layanan dari dinas ini juga beragam, mencerminkan keberagaman fungsi dan program kerja yang dimilikinya. Untuk itu, pengelompokan sasaran layanan dilakukan berdasarkan empat bidang utama yang menjadi fokus pelayanan, yaitu: Pariwisata, Ekonomi Kreatif Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.

##### 1. Sektor Pariwisata

Fokus pelayanan di sektor ini adalah peningkatan daya saing dan kualitas destinasi wisata, promosi wisata daerah, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Kelompok sasaran layanan di sektor ini meliputi:

- Wisatawan Domestik dan Mancanegara: Sebagai pengguna langsung dari destinasi, produk, dan layanan wisata yang dikembangkan;
- Pelaku Usaha Pariwisata: Termasuk pengelola hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, dan operator tur yang menjadi mitra kerja strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor pariwisata;
- Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Wisata: Terutama yang terlibat dalam pariwisata berbasis masyarakat, seperti pengelola homestay, desa wisata, dan pelaku kuliner lokal;
- Investor dan Mitra Usaha: Pihak-pihak yang tertarik menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur dan layanan pariwisata di daerah;
- Pelajar dan Mahasiswa Pariwisata: Sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi generasi muda di sektor ini melalui magang, pelatihan, dan bimbingan teknis.



## 2. Sektor Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berperan penting dalam menciptakan nilai tambah berbasis ide, kreativitas, dan inovasi. Sektor ini menyasar individu maupun komunitas yang memiliki potensi dalam mengembangkan produk kreatif yang berdaya saing.

Kelompok sasaran layanan di Sektor ini antara lain:

- Pelaku Ekonomi Kreatif: Seperti desainer, perajin, fotografer, pengusaha kuliner, pelaku seni pertunjukan, content creator, dan produsen film;
- Komunitas Kreatif Daerah: Kelompok atau asosiasi yang menjadi motor penggerak inovasi lokal serta penyelenggara event atau festival kreatif;
- Lembaga Pendidikan Vokasional dan Seni: Sekolah dan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pelatihan bidang kreatif;
- Masyarakat Umum: Penerima manfaat dari produk-produk ekonomi kreatif yang inovatif dan berkualitas.

## 3. Sektor Kebudayaan

Pelayanan pada Sektor ini mencakup pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai identitas dan kekuatan sosial masyarakat.

Sasaran layanan Sektor kebudayaan meliputi:

- Seniman dan Budayawan: Individu atau kelompok yang aktif menciptakan, melestarikan, dan menampilkan karya seni budaya;
- Komunitas Adat dan Tradisi Lokal: Kelompok masyarakat yang menjaga dan meneruskan warisan budaya, baik yang bersifat material maupun non-material;
- Pelajar dan Mahasiswa: Terutama dalam kegiatan edukasi budaya dan pelatihan kesenian di sekolah dan kampus;
- Lembaga Kebudayaan dan Sanggar Seni: Tempat berkegiatan budaya dan pendidikan seni Masyarakat;
- Masyarakat Umum: Sebagai penerima manfaat dari kegiatan pertunjukan, festival budaya, pameran seni, hingga edukasi sejarah dan nilai-nilai lokal.

## 4. Sektor Kepemudaan

Sektor ini bertujuan untuk membina, memberdayakan, dan mengembangkan potensi generasi muda agar menjadi agen perubahan yang berdaya saing dan memiliki karakter kuat.



Kelompok sasaran utama Sektor kepemudaan:

- Pemuda dan Remaja Usia 16–30 Tahun: Sasaran langsung dari berbagai program pembinaan karakter, kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, dan pemberdayaan;
- Organisasi Kepemudaan: Seperti Karang Taruna, Pramuka, OSIS, dan komunitas pemuda lainnya yang menjadi mitra strategis pemerintah daerah;
- Wirausahawan Muda: Pemuda yang memulai atau mengembangkan usaha sebagai bagian dari program inkubasi atau fasilitasi kewirausahaan pemuda;
- Relawan dan Komunitas Sosial Pemuda: Kelompok yang aktif di bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan hidup;
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Nonformal: Penerima program pembinaan soft skill dan peningkatan kapasitas pemuda.

#### 5. Sektor Olahraga

Pelayanan pada Sektor ini mencakup pembinaan atlet, penyediaan sarana olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta penyelenggaraan event olahraga.

Sasaran layanan di Sektor olahraga mencakup:

- Atlet dan Pelatih: Sasaran utama pembinaan olahraga prestasi, termasuk dari usia dini hingga tingkat profesional;
- Pelajar dan Mahasiswa: Dalam konteks pengembangan olahraga pendidikan, serta pembentukan karakter melalui kegiatan olahraga di lingkungan sekolah;
- Masyarakat Umum: Penerima manfaat dari program olahraga rekreasi, kegiatan senam massal, jalan sehat, lomba rakyat, dan fasilitas olahraga public;
- Klub Olahraga dan Organisasi Keolahragaan: Mitra dalam pengembangan olahraga prestasi dan penyelenggaraan kejuaraan;
- Penyandang Disabilitas: Termasuk dalam pengembangan olahraga difabel (Paralympic) sebagai wujud inklusivitas pelayanan.

Dengan keberagaman kelompok sasaran yang mencakup lintas sektor dan lintas usia, dinas ini berperan sebagai penggerak ekosistem pembangunan daerah berbasis potensi manusia dan kearifan lokal. Pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok sasaran menjadi kunci utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, setiap program dan



layanan publik yang dirancang harus memperhatikan keunikan karakteristik, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok sasaran tersebut.

Ke depan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor, inovasi layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi aktif seluruh kelompok sasaran dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

Dalam menghadapi dinamika perkembangan global, nasional, dan regional, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Berbagai potensi unggulan daerah yang menjadi kewenangan dinas ini, seperti destinasi wisata alam dan budaya, subsektor ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan lokal, pengembangan kepemudaan, serta pembinaan olahraga, belum dapat dikembangkan secara optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan anggaran yang masih belum memadai.

Selain itu, pengaruh perubahan lingkungan strategis, mulai dari perubahan iklim global, transformasi digital nasional, hingga persaingan dan perkembangan di tingkat regional, turut memberikan tekanan sekaligus peluang yang harus diantisipasi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis yang relevan menjadi sangat penting sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Adapun permasalahan dan isu strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjab Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Permasalahan

- Pengelolaan potensi wisata bahari, ekowisata, dan wisata budaya belum optimal.
- Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di destinasi wisata.
- Promosi pariwisata masih terbatas dan belum sepenuhnya berbasis digital.
- Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata masih rendah.
- Belum adanya paket wisata terpadu yang menarik wisatawan.
- Produk ekonomi kreatif belum memiliki daya saing yang kuat di pasar.
- Akses pemasaran produk kreatif masih terbatas.
- Dukungan infrastruktur dan ruang kreativitas bagi pelaku ekonomi kreatif masih minim.



- Kurangnya literasi digital dan manajemen usaha bagi pelaku usaha kreatif.
- Terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.
- Pelestarian budaya tradisional masih terbatas dan cenderung tergerus modernisasi.
- Fasilitas pendukung kegiatan seni dan budaya masih minim.
- Dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya belum optimal.
- Rendahnya apresiasi generasi muda terhadap nilai-nilai budaya daerah.
- Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah masih rendah.
- Terbatasnya wadah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan pemuda.
- Akses pemuda terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas masih terbatas.
- Fenomena masalah sosial pemuda (pengangguran, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba).
- Sarana dan prasarana olahraga belum memadai dan belum merata.
- Prestasi olahraga daerah masih terbatas dan belum konsisten.
- Kurangnya pembinaan atlet muda secara berkesinambungan.
- Minimnya event olahraga yang berkelanjutan dan berjenjang.

## 2. Isu Strategis

- Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
- Peningkatan promosi pariwisata melalui platform digital dan kolaborasi lintas sektor.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Penyusunan dan promosi paket wisata terpadu yang menarik pasar nasional.
- Peningkatan daya saing produk ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
- Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui dukungan infrastruktur dan ruang kreatif.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan promosi produk kreatif.
- Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis.
- Perluasan akses permodalan dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya daerah.
- Revitalisasi seni dan budaya untuk meningkatkan identitas daerah.
- Pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi dan promosi budaya.
- Peningkatan peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya.
- Penguatan kapasitas dan kemandirian pemuda melalui pelatihan dan kewirausahaan.
- Pengembangan pusat kreativitas dan inovasi pemuda.
- Mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
- Pencegahan masalah sosial melalui program pembinaan pemuda.
- Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga daerah.
- Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
- Penyelenggaraan event olahraga daerah, regional, maupun nasional.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga.



Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki keunggulan komparatif pada lima sektor utama ini, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan identitas budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pada sektor pariwisata, potensi wisata alam seperti pesisir pantai, hutan mangrove, jalur sungai, dan potensi ekowisata menjadi daya tarik utama. Kawasan ini juga memiliki peluang untuk mengembangkan wisata bahari, wisata edukasi lingkungan, serta paket wisata berbasis masyarakat. Namun, infrastruktur akses menuju destinasi wisata masih terbatas, tata kelola kawasan wisata belum tertata dengan baik, dan promosi digital belum optimal. Selain itu, isu lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran sungai, dan kerentanan destinasi terhadap banjir dan rob menjadi tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Sektor ekonomi kreatif (ekraf) memiliki potensi besar melalui produk khas lokal, seperti kuliner berbasis hasil laut dan sungai, kerajinan tangan, batik pesisir, hingga produk seni pertunjukan dan digital kreatif. Potensi ini dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang berbasis inovasi dan kearifan lokal. Namun, keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital pelaku dan lemahnya inovasi produk menjadi penghambat dalam pengembangan ekraf. Tantangan lain adalah kurangnya jaringan pemasaran regional dan global, serta risiko limbah produksi yang belum dikelola dengan ramah lingkungan.

Pada sektor kebudayaan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki warisan budaya yang kaya, mulai dari tradisi lisan, musik Melayu pesisir, permainan rakyat, hingga situs sejarah lokal. Potensi ini belum terkelola secara optimal karena minimnya program pelestarian, terbatasnya fasilitas seni dan budaya, serta risiko hilangnya kearifan lokal akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Revitalisasi budaya daerah dan regenerasi pelaku seni menjadi isu strategis yang mendesak untuk menjaga identitas lokal agar tidak tergeser oleh budaya luar yang semakin mendominasi.

Sektor kepemudaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena generasi muda merupakan agen perubahan yang berpotensi besar dalam kewirausahaan, inovasi sosial, dan pengembangan desa. Meskipun terdapat komunitas pemuda aktif di wilayah pesisir dan pedesaan, wadah kreativitas dan pembinaan keterampilan kerja masih



sangat terbatas. Urbanisasi dan minimnya peluang di daerah menyebabkan migrasi pemuda ke kota besar, mengurangi ketersediaan SDM produktif di desa. Isu strategis yang perlu diatasi adalah pemberdayaan pemuda berbasis teknologi, penyediaan ruang publik yang ramah pemuda, dan dukungan terhadap kewirausahaan muda yang inovatif.

Sektor olahraga memiliki potensi untuk dikembangkan melalui sport tourism berbasis alam dan perairan, pembinaan atlet lokal berprestasi, serta antusiasme masyarakat terhadap olahraga massal. Namun, sarana olahraga belum merata dan tidak memenuhi standar kompetisi, jumlah pelatih terbatas, serta minimnya event olahraga berskala daerah hingga nasional menghambat pengembangan prestasi dan ekonomi olahraga. Selain itu, degradasi ruang terbuka hijau dan cuaca ekstrem menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga berkelanjutan.

Melihat dinamika global, nasional, dan regional, sektor Pariwisata, Ekraf, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga perlu beradaptasi dengan tren pariwisata hijau, ekonomi digital, dan sport tourism modern. Kolaborasi antar-stakeholder, inovasi berbasis teknologi, penguatan SDM, serta penataan kebijakan ramah lingkungan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan sektor ini yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah, inovatif, dan berkelanjutan, diperlukan kajian strategis yang mencerminkan kondisi riil kelembagaan. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis SWOT sebagai alat untuk mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi Disparpora, termasuk dalam kaitannya dengan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar penting penggerak ekonomi lokal dan pelestarian identitas budaya. Berikut uraian analisa SWOT nya :

1. Strengths (Kekuatan)

- Memiliki potensi wisata bahari, sungai, dan hutan mangrove yang unik dan jarang dimiliki daerah lain.
- Jalur sungai strategis mendukung wisata transportasi air dan sport tourism berbasis perairan.
- Keanekaragaman budaya, tradisi, dan situs sejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya.
- Ketersediaan produk khas daerah (kuliner, kerajinan, batik) yang dapat dikembangkan menjadi ekraf unggulan.



- Adanya komunitas pemuda aktif di pedesaan dan pesisir sebagai basis penggerak kegiatan kepemudaan dan inovasi sosial.
- Bibit atlet daerah berpotensi berprestasi pada tingkat regional dan nasional.
- Peluang pengembangan sport tourism dengan dukungan alam dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga massal.
- Arah kebijakan nasional mendukung pariwisata berkelanjutan, revitalisasi budaya daerah, dan penguatan sport tourism.

## 2. Weaknesses (Kelemahan)

- Infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata masih terbatas.
- Promosi wisata dan ekraf masih manual, belum maksimal memanfaatkan teknologi digital.
- Investasi dan tata kelola destinasi wisata belum optimal, termasuk keterbatasan sarana prasarana seni, budaya, dan olahraga.
- Rendahnya inovasi produk ekraf dan kualitas kemasan sehingga sulit bersaing di pasar luar daerah.
- Akses permodalan dan distribusi produk ekraf terbatas, literasi digital pelaku ekraf masih rendah.
- Minimnya program pelestarian budaya dan fasilitas ruang seni yang memadai.
- Fasilitas dan wadah kreativitas pemuda terbatas, pembinaan keterampilan kerja belum terstruktur.
- Kurangnya pelatih olahraga dan pembinaan atlet berjenjang, serta minimnya event olahraga regional.

## 3. Opportunities (Peluang)

- Tren global menuju ekowisata, wisata berbasis digital, dan sport tourism berkelanjutan.
- Potensi besar untuk pengembangan wisata halal, festival budaya, dan event pariwisata bertaraf regional/nasional.
- Dukungan kebijakan nasional terhadap hilirisasi produk lokal, penguatan SDM pariwisata, dan pengembangan ekraf berbasis teknologi.
- Peningkatan akses pembiayaan wirausaha muda yang dapat dimanfaatkan untuk ekraf dan usaha wisata.
- Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, media) untuk pengembangan pariwisata, budaya, pemuda, dan olahraga.



- Adanya peluang promosi digital melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce.
- Urbanisasi dan pola konsumsi masyarakat membuka pasar baru bagi produk ekraf daerah.

#### 4. Threats (Ancaman)

- Penurunan daya dukung kawasan wisata akibat abrasi, pencemaran, dan alih fungsi lahan pesisir.
- Risiko bencana banjir dan rob di kawasan wisata serta cuaca ekstrem yang mengganggu event olahraga dan wisata alam.
- Persaingan destinasi wisata, ekraf, festival budaya, dan sport tourism antar daerah bahkan lintas negara.
- Hilangnya nilai budaya dan kearifan lokal akibat modernisasi, globalisasi, dan komersialisasi tanpa pelestarian.
- Urbanisasi memengaruhi pola hidup pemuda dan mendorong migrasi pemuda ke kota besar sehingga SDM desa berkurang.
- Pertumbuhan ekonomi digital global yang cepat meningkatkan persaingan produk ekraf lintas negara.
- Degradasi ruang terbuka hijau yang mengancam pengembangan sarana olahraga dan wisata alam.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra**

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkembang di lima sektor utama, yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, maka Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sejumlah tujuan strategis yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan sektor-sektor tersebut selama lima tahun ke depan. Tujuan ini tidak hanya selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga bertujuan untuk menjawab tantangan aktual, mengoptimalkan potensi lokal, serta memperkuat kontribusi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan peningkatan daya saing daerah, pelibatan masyarakat, penguatan identitas budaya, serta pengembangan kapasitas pemuda dan atlet. Seluruh tujuan ini menjadi fondasi dalam penyusunan arah kebijakan, indikator kinerja utama, dan sasaran pembangunan jangka menengah di lingkungan Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam mencapai tujuan strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada beberapa langkah – Langkah operasional sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
  - Melalui pengembangan destinasi unggulan, peningkatan infrastruktur, serta promosi yang inovatif dan berbasis digital.
  - Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor ekonomi kreatif lokal
  - Dengan memperkuat ekosistem ekraf berbasis inovasi, teknologi, dan potensi lokal.
  - Mewujudkan creative hub (pusat kreatif) dan inkubator usaha serta mendukung pendaftaran HKI sebagai bentuk perlindungan dan penguatan produk lokal.



3. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya daerah secara sistemik
  - Melalui dokumentasi, edukasi budaya kepada generasi muda, revitalisasi tradisi lokal, dan integrasi budaya dengan sektor wisata dan ekraf.
  - Menjadikan budaya sebagai pilar identitas daerah dan daya tarik pariwisata.
4. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
  - Dengan membangun sistem pembinaan kepemudaan yang terstruktur, inklusif, dan adaptif terhadap era digital.
  - Mendorong kewirausahaan, kepemimpinan, serta keterlibatan pemuda dalam pengambilan kebijakan.
5. Meningkatkan prestasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga
  - Melalui pengembangan infrastruktur olahraga yang layak, pembinaan berjenjang dari usia dini, serta kompetisi yang rutin dan kompetitif.
  - Mengembangkan sport tourism dan memperkuat tata kelola olahraga berbasis kemitraan lintas sektor.

Dari ke lima uraian diatas maka tujuan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah *Mengintegrasikan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga dalam satu ekosistem strategis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang adaptif, serta ekonomi daerah yang inklusif dan merata.*

Penjabaran Hubungan tujuan diatas dengan Misi Kepala Daerah:

- ❖ **Misi 1: BERKAH dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif, yaitu**
  - Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi, pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pelaku serta komunitas di setiap sektor.
  - Pelestarian budaya dan pemberdayaan pemuda menjadi sarana pembentukan karakter masyarakat yang religius, harmonis, dan berintegritas, sejalan dengan penciptaan kondisi sosial yang tertib dan mantap.
  - Inovasi dalam pengelolaan sektor-sektor ini, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor, mendukung terciptanya masyarakat yang adaptif dan berdaya saing.



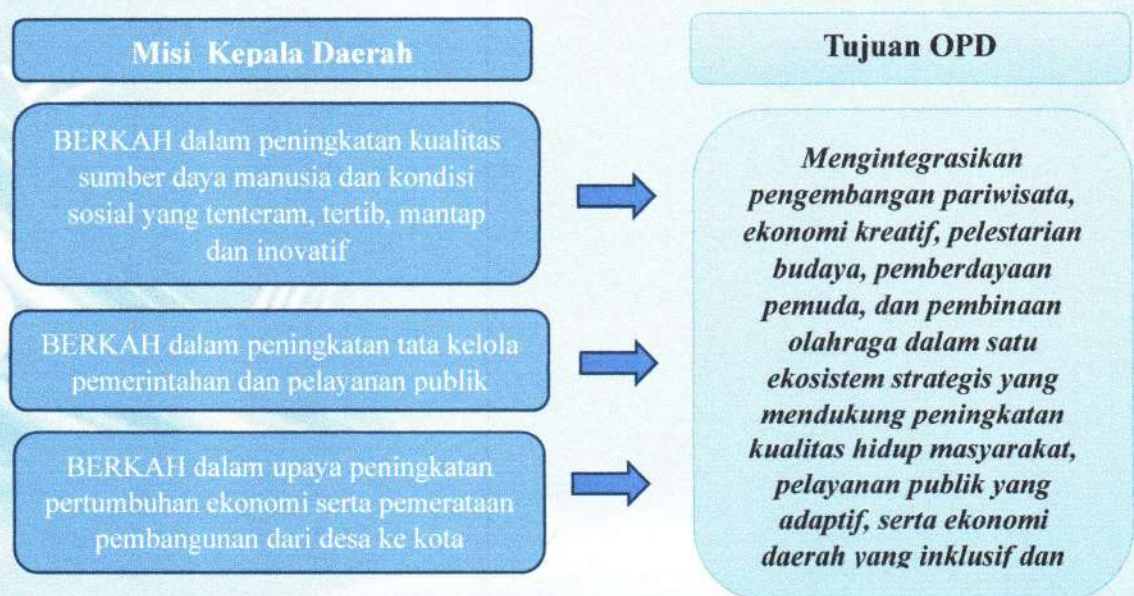
❖ **Misi 2: BERKAH dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public, yaitu:**

- Peningkatan tata kelola sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga dilakukan melalui sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, sesuai prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- Kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan sektor swasta mendorong terciptanya pelayanan publik yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
- Integrasi budaya lokal dalam pelayanan publik juga memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

❖ **Misi 3: BERKAH dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota, yaitu:**

- Pengembangan destinasi wisata, produk ekonomi kreatif, dan event budaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang tersebar di desa dan kota.
- Pemerataan infrastruktur olahraga dan pusat kreatif mendukung peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan pembangunan lintas wilayah.
- Ekosistem pariwisata dan ekraf yang terintegrasi membuka akses pasar, meningkatkan daya tarik investasi daerah, dan memperkuat posisi Tanjung Jabung Barat sebagai daerah yang kompetitif secara regional.

Adapun skema hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :





Skema hubungan antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperlihatkan alur integrasi yang sistematis. Visi dan misi Kepala Daerah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, menjadi acuan bagi OPD dalam merumuskan tujuan strategis. Tujuan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga diarahkan untuk mengintegrasikan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga dalam satu ekosistem strategis. Skema ini memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara misi Kepala Daerah dengan tujuan OPD, di mana pencapaian indikator kinerja dan target tahunan 2025–2029 menjadi alat ukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat terfokus, terukur, dan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang adaptif, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan merata.

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas setiap program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan indikator, keberhasilan maupun kendala dapat diidentifikasi secara sistematis, sehingga langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi dapat segera dilakukan. Selain itu, indikator juga menjadi sarana akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan masyarakat, pemangku kepentingan, serta jajaran internal untuk memantau progres pembangunan secara objektif. Indikator kinerja ini selanjutnya dijabarkan ke dalam target tahunan dan kumulatif untuk periode 2025–2029, sehingga setiap capaian dapat diukur secara konkret dan berkesinambungan. Lebih dari itu, indikator kinerja memberikan fokus dan motivasi bagi seluruh tim untuk bekerja secara terarah dan konsisten, memastikan setiap upaya dan sumber daya yang digunakan memberikan dampak nyata, mendorong pencapaian tujuan strategis, serta memperkuat kontribusi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Adapun uraian indikator dan target tujuan dapat dilihat pada tabel 3.3.1.



### 3.2 Sasaran Renstra

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan daerah melalui penetapan sasaran strategis yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal, dinas ini menetapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperkuat identitas budaya daerah, serta membina generasi muda yang produktif dan berkarakter.

Sasaran strategis yang disusun tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan jangka menengah dan panjang. Harapannya, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas, diharapkan tercipta ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterjangkauan informasi, serta belum optimalnya kolaborasi antar sektor, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Melalui perumusan sasaran strategis ini, diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan di sektor-sektor terkait, serta terbentuknya tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung kemajuan daerah.

Adapun sasaran strategi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

1. Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik
2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif local
3. Melestarikan dan merevitalisasi warisan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.



Setiap sasaran strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan target capaian tahunan untuk periode 2025–2029. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian sasaran, evaluasi efektivitas program, dan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga setiap upaya dapat terfokus, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Adapun uraian indikator dan target sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.3.1.

### **3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sararan**

Untuk mewujudkan tujuan utama yaitu mengintegrasikan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga ke dalam satu ekosistem strategis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang adaptif, serta ekonomi daerah yang inklusif dan merata, diperlukan pendekatan strategis yang menyeluruh, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal. Strategi yang dirumuskan secara garis besar mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur pendukung, promosi terpadu, dan digitalisasi layanan publik.

Berikut adalah strategi yang disesuaikan dengan masing-masing sasaran:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
  - Mengembangkan dan memperkuat promosi destinasi wisata secara digital dan konvensional melalui media sosial, platform pariwisata nasional, dan event promosi daerah.
  - Meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan.
  - Menyusun paket wisata tematik berbasis budaya, alam, dan ekonomi kreatif lokal.
  - Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing destinasi.
2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif lokal
  - Menyelenggarakan pelatihan keterampilan, inovasi produk, dan manajemen usaha bagi pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsector.



- Menyediakan fasilitas pendukung seperti rumah kreatif dan inkubator usaha kreatif.
  - Membuka akses pasar melalui pameran, marketplace digital, dan kolaborasi dengan e-commerce.
  - Memberikan dukungan pembiayaan melalui fasilitasi KUR, hibah kreatif, dan program kemitraan CSR.
3. Melestarikan dan merevitalisasi warisan budaya daerah sebagai daya tarik wisata
- Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan digitalisasi warisan budaya daerah (tangible & intangible).
  - Mendorong revitalisasi situs dan bangunan bersejarah sebagai destinasi edukatif dan atraktif.
  - Mendukung penyelenggaraan event budaya daerah secara rutin dan berkelanjutan.
  - Memberdayakan komunitas budaya dan pelaku seni lokal sebagai agen pelestari dan promotor budaya.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah
- Mengembangkan program kepemudaan berbasis kewirausahaan sosial, teknologi, dan lingkungan.
  - Mendorong terbentuknya forum-forum kepemudaan sebagai wadah ekspresi, kolaborasi, dan advokasi.
  - Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, penguatan karakter, dan pengembangan soft skill.
  - Memperluas akses pemuda terhadap informasi, pelatihan kerja, dan peluang beasiswa atau magang.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga
- Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.
  - Mengembangkan sistem pembinaan atlet mulai dari usia dini.
  - Menyelenggarakan event dan kompetisi olahraga secara berkala untuk mendorong partisipasi luas.



- Meningkatkan kapasitas pelatih, wasit, dan pengelola cabang olahraga melalui pelatihan berjenjang.
6. Strategi Penunjang Umum (Lintas Sektor)
- Digitalisasi Layanan & Informasi: Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, layanan publik, serta promosi dan edukasi lintas sektor.
  - Kolaborasi Multi-Pihak: Mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa, lembaga pendidikan, komunitas, dan pelaku usaha dalam implementasi program.
  - Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja: Menetapkan indikator capaian yang terukur untuk setiap program agar pelaksanaan strategi dapat dievaluasi secara berkala.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perlu menetapkan indikator dan target jangka panjang pada tabel 3.1 sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
<b>NSPK : Sektor pariwisata, ekraf, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan</b> <b>&gt; Sektor Pariwisata</b> - Pengelolaan & Pengembangan - Pengembangan SDM & Kelembagaan Pariwisata - Pengelolaan Pemasaran Pariwisata <b>&gt; Sektor Ekraf</b> - Pengembangan SDM Ekraf melalui pelatihan dan inkubasi - Penguatan akses pemasaran & pembiayaan produk ekraf - Pengembangan ekosistem kelembagaan ekraf lokal <b>&gt; Sektor Kebudayaan</b> - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan - Pelestarian Warisan Budaya dan Tradisi Lokal - Fasilitasi kegiatan seni budaya berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terwujudnya kehidupan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, serta meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga		- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	0,29	0,3	0,31	0,32	0,32	0,32	
			- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	50%	50.5%	51%	51.5%	52%	52%	
			- Jumlah Organisasi	6	8	8	10	10	10	
			- Jumlah medali tingkat provinsi/nasional per tahun	125	250	125	125	250	250	
		- Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman)	785.000 Orang	800.000 Orang	786.000 Orang	786.000 Orang	787.000 Orang	787.000 Orang	
		- Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif lokal	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/inkubasi	20%	23%	25%	27%	29%	29%	
		- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	30%	31%	32%	33%	33%	33%	
		- Meningkatkan karya budaya	Jumlah penampilan karya budaya	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	
		- Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.	Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat	25%	25%	25%	25%	25%	25%	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
<p>&gt; <b>Sektor Kepemudaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kapasitas pemuda melalui pelatihan kewirausahaan,</li> <li>- Fasilitasi organisasi kepemudaan berjejaring nasional</li> </ul> <p>&gt; <b>Sektor Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengembangan olahraga berjenjang</li> <li>- Penyelenggaraan kompetisi daerah dan pembinaan prestasi</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul> <p><b>Sasaran RPJMD yang Relevan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah</li> <li>- Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran</li> <li>- Meningkatnya pelestarian dan</li> <li>- Kemandirian desa secara berkelanjutan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.</li> </ul>	Jumlah atlet berprestasi	176	200	176	184	200	200	



Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), diperlukan suatu tahapan pembangunan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk konkret dari proses perencanaan jangka menengah yang memecah target-target strategis ke dalam prioritas pembangunan tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih fokus dan terarah sesuai dengan kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Setiap tahapan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan logis antara program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode RENSTRA. Dengan demikian, proses pembangunan tidak dilakukan secara sporadis atau parsial, tetapi mengikuti alur kebijakan yang berkesinambungan dan integratif. Tahapan ini juga memberikan ruang untuk penyesuaian secara adaptif terhadap perubahan regulasi, kebijakan nasional/daerah, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana. Selain itu, penahapan pembangunan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai acuan dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan menentukan prioritas tahunan yang jelas dan realistis, instansi atau perangkat daerah dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi capaian kinerja setiap tahun, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui penahapan yang tepat, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat mendorong pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Adapun tahapan tersebut sebagaimana tabel 3.2 sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Penahapan RENSTRA 2025 -2029**

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
5	5	5	5	5
- Pembangunan sektor pariwisata: penguatan event destinasi, pemetaan sarana daya tarik wisata unggulan, promosi awal, dan perencanaan kawasan strategis.	- Penguatan sarana dan kawasan wisata strategis: peningkatan kualitas kegiatan promosi dalam dan luar negeri; penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan mulai digarap	- Ekspansi kegiatan: pemberdayaan masyarakat dimulai, promosi media ditingkatkan, penetapan usaha pariwisata berjalan, dan infrastruktur kawasan diperkuat.	- Konsolidasi dan peningkatan kualitas promosi pariwisata; penambahan sarana kawasan strategis; penguatan laporan pemberdayaan masyarakat dan pengawasan usaha.	- Pemantapan capaian: kegiatan rutin diperkuat, kualitas kunjungan ditingkatkan, pengelolaan destinasi lebih sistematis, serta promosi dan pengawasan berjalan stabil.
- Identifikasi subsektor ekraf potensial, penyediaan ruang ekspresi, dan pendataan pelaku ekraf; fasilitasi kompetensi mulai dirintis.	- Penguatan kapasitas SDM: fasilitasi ekraf meningkat, jumlah peserta kompetensi bertambah, dan sarana kota kreatif mulai direvitalisasi.	- Perluasan sistemik: produk ekraf mulai dipasarkan, sistem pemasaran dibangun, pelaku difasilitasi HKI, serta peningkatan jumlah subsektor difasilitasi.	- Konsolidasi ekosistem ekraf: jumlah produk dan dokumen pemasaran meningkat, kegiatan fasilitasi HKI rutin, serta penguatan kapasitas SDM secara	- Pemantapan: kegiatan diperluas dan berkelanjutan, fokus pada hilirisasi produk, sertifikasi SDM, serta optimalisasi ruang kreatif dan promosi.
	- Penguatan: konsistensi program kesenian dan pelestarian budaya, fasilitasi lembaga adat, dan penguatan komunitas.	- Ekspansi: peningkatan peran masyarakat, penguatan dokumentasi sejarah, dan promosi nilai budaya lokal.	- Konsolidasi: peningkatan kualitas kegiatan, dukungan pembinaan kesenian, dan pelibatan publik lebih luas.	- Pemantapan: keberlanjutan program budaya, pelestarian warisan budaya, dan optimalisasi partisipasi masyarakat.
- Penyadaran dan pemberdayaan pemuda pelopor, pendataan wirausaha muda, fasilitasi organisasi pemuda.	- Penguatan: peningkatan jumlah wirausaha muda, pelatihan kepeloporan, penyediaan sarana kepemudaan, dukungan ke organisasi pemuda.	- Ekspansi: peningkatan fasilitasi wirausaha muda, perluasan organisasi yang diberdayakan, konsolidasi prasarana dan program kepemudaan.	- Konsolidasi: penguatan dokumen kebijakan kepemudaan daerah (RAD), peningkatan jumlah pemuda aktif, dan skala program yang lebih besar.	- Pemantapan: optimalisasi fasilitasi organisasi pemuda, pengembangan kewirausahaan mandiri dan pelopor, serta peningkatan keberlanjutan program.
- Pembinaan atlet muda dan olahraga pendidikan, penyediaan sarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan tingkat dasar dan kontingen awal.	- Penguatan: peningkatan cakupan pembinaan, pelaksanaan kejuaraan single/multi event, peningkatan sarana dan pelatihan atlet berprestasi.	- Ekspansi: peningkatan jumlah atlet/kontingen, penghargaan olahraga, data sistem olahraga kabupaten/kota mulai disiapkan.	- Konsolidasi: penguatan pembinaan prestasi, konsistensi kegiatan rekreasi, penguatan penyelenggaraan olahraga wisata dan tantangan.	- Pemantapan: capaian maksimal dalam pembinaan prestasi, kegiatan keolahragaan berkelanjutan, pemberian penghargaan dan partisipasi lebih



### **3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan arah kebijakan yang memayungi setiap program dan kegiatan secara terpadu. Arah kebijakan ini disusun sebagai panduan strategis untuk mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah agar lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tantangan pembangunan yang semakin kompleks, ditambah dengan dinamika sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi, mendorong perlunya kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, penyusunan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, isu-isu strategis daerah, serta kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan.

Pendekatan yang digunakan menekankan pada integrasi lintas sektor, sinergi multipihak (pentahelix), penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setiap sektor—baik pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, maupun olahraga—memiliki arah kebijakan yang dirancang secara spesifik, namun tetap saling mendukung dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan yang telah disusun menggambarkan keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan langkah-langkah nyata yang akan diambil melalui berbagai program. Penekanan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, inovasi, dan perluasan akses menjadi kunci dalam menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi sektor-sektor tersebut.

Dengan adanya arah kebijakan ini, perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan program-program secara lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih baik. Adapun arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada tabel 3.4 berikut:



**Tabel 3.4**  
**Arah Kebijakan**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
1	<b>Sektor Pariwisata</b> Pengelolaan & Pengembangan Destinasi              - Pengembangan SDM & Kelembagaan Pariwisata              - Pengelolaan Pemasaran Pariwisata	- Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan	- Penguatan tata kelola daya tarik wisata berbasis potensi lokal, budaya, dan kearifan lokal	
		- Pengembangan hilirisasi dan rantai nilai (value chain) produk unggulan	- Pengembangan ekosistem pariwisata (akomodasi, kuliner, kerajinan, event) yang terhubung dengan sektor ekonomi	
		- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah	- Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata melalui kerja sama lintas sektor (Dinas PU, Perhubungan, dan	
		- Penyediaan infrastruktur dasar untuk kawasan ekonomi dan industri	- Pengembangan infrastruktur dasar destinasi wisata (toilet umum, parkir, signage, pusat informasi)	
		- Peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa, kecamatan, dan kabupaten	- Advokasi pembangunan jalan penunjang pariwisata melalui forum lintas OPD dan Musrenbang	
		- Penguatan kerja sama antarwilayah dan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas	- Membangun kemitraan strategis dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan investor dalam pengembangan kawasan wisata prioritas	
		- Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dan wirausaha	- Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan hospitality, CHSE, pemandu wisata, dan manajemen	
		- Digitalisasi dan modernisasi UMKM	- Fasilitasi digitalisasi promosi usaha pariwisata (web, medsos, peta digital, QR destinasi) dan transaksi non-tunai	
		- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional	- Kolaborasi pelatihan vokasi pariwisata dengan SMK, Balai Latihan Kerja, dan lembaga pelatihan sertifikasi	
		- Pengembangan sertifikasi kompetensi tenaga kerja	- Fasilitasi sertifikasi profesi pelaku pariwisata (pemandu, instruktur wisata,	
		- Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi kerja	- Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan destinasi dan potensi lokal wisata daerah	
		- Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan	- Pendampingan aparatur desa wisata untuk pengelolaan, promosi, dan manajemen destinasi desa wisata	
		- Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDesma	- Penguatan peran BUMDes sebagai operator layanan wisata desa (tiket, homestay, penyewaan, kuliner lokal)	
		- Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal	- Digitalisasi pemasaran destinasi dan produk wisata lokal melalui media sosial, platform pariwisata, dan marketplace pariwisata daerah	
		- Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi daerah	- Penguatan branding destinasi unggulan serta fasilitasi promosi peluang investasi pariwisata melalui event dan forum investasi daerah	
		- Penguatan promosi dan akses pasar UMKM	- Sinergi promosi antara pelaku pariwisata dan pengelola destinasi dalam satu paket wisata terpadu berbasis lokal	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam proses produksi</li> <li>- Peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah</li> <li>- Penguatan sinergi program pembangunan antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan konten kreatif, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi informasi bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>- Fasilitasi pengembangan layanan wisata halal dan edukasi pengelolaan wisata ramah muslim pada destinasi tertentu</li> <li>- Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan program pusat seperti pengembangan desa wisata Kemenparekraf dan infrastruktur</li> </ul>	
2	<b>Sektor Ekraf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan SDM Ekraf melalui pelatihan dan inkubasi</li> <li>- Penguatan akses pemasaran &amp; pembiayaan produk ekraf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dan wirausaha</li> <li>- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional</li> <li>- Pengembangan sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>- Peningkatan akses pelatihan kerja dan keterampilan berbasis kebutuhan pasar</li> <li>- Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi kerja</li> <li>- Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan</li> <li>- Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal</li> <li>- Penguatan promosi dan akses pasar UMKM</li> <li>- Digitalisasi dan modernisasi UMKM</li> <li>- Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan UMKM</li> <li>- Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Layanan Keuangan Syariah</li> <li>- Pengembangan Industri Produk Halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis kreatif bagi pelaku ekraf lokal (kuliner, kriya, fesyen, dll)</li> <li>- Kolaborasi dengan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi dalam pengembangan program keterampilan berbasis potensi lokal ekraf</li> <li>- Pemberian fasilitasi sertifikasi kompetensi pelaku ekraf pada bidang desain, multimedia, kuliner, dan event kreatif melalui LSP/Lembaga terkait</li> <li>- Penguatan pelatihan berbasis kebutuhan pasar industri kreatif, termasuk pelatihan digital marketing, editing konten, dan kemasan produk</li> <li>- Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis standar kompetensi nasional di bidang ekraf, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan mitra pendidikan</li> <li>- Peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam mendukung produk ekonomi kreatif berbasis potensi desa, melalui pelatihan manajemen usaha</li> <li>- Fasilitasi promosi produk ekraf melalui festival, expo, marketplace digital, dan kerja sama dengan retail modern/regional</li> <li>- Pengembangan strategi branding dan storytelling produk ekraf berbasis budaya dan kearifan lokal</li> <li>- Penyediaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan e-commerce, media sosial, dan aplikasi kasir digital</li> <li>- Fasilitasi kemitraan pelaku ekraf dengan lembaga keuangan (KUR, BPR, koperasi) dan platform pendanaan kreatif (crowdfunding, inkubasi bisnis)</li> <li>- Advokasi dan promosi skema pembiayaan berbasis syariah bagi pelaku ekraf Muslim, termasuk penyediaan informasi dan literasi keuangan</li> <li>- Dukungan sertifikasi halal untuk produk kuliner, kosmetik, dan kerajinan serta promosi produk halal sebagai bagian dari daya saing ekraf daerah</li> </ul>	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
-	Pengembangan ekosistem kelembagaan ekraf lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi desa</li> <li>- Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDesma</li> <li>- Optimalisasi peran dunia usaha dalam pembangunan daerah</li> <li>- Sinergi kebijakan dan regulasi pusat-daerah dalam pengembangan ekonomi syariah</li> <li>- Penguatan kerja sama antarwilayah dan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas</li> <li>- Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kolaborasi pelaku ekraf dengan BUMDes/BUMDesma untuk mengelola usaha berbasis potensi lokal seperti kriya, kuliner, dan pertunjukan</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen usaha kreatif dan inkubasi bisnis berbasis komunitas desa</li> <li>- Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar dan pelaku industri kreatif nasional untuk mendukung ekraf lokal melalui CSR, coaching, dan distribusi produk</li> <li>- Mendorong sinkronisasi program pelatihan, pembiayaan, dan promosi ekraf syariah dengan program Kemenparekraf, Kemenag, dan BAZNAS</li> <li>- Penguatan jaringan antar pelaku ekraf melalui forum kreatif lintas daerah, kolaborasi pemasaran bersama, serta festival seni-budaya antar kabupaten/kota</li> <li>- Fasilitasi pendampingan penyusunan rencana pengembangan desa kreatif dan integrasi ekraf dalam dokumen RPJMDes dan APBDes berbasis potensi unggulan lokal</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>Sektor Kebudayaan</b>			
-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kampanye dan edukasi publik tentang pencegahan kekerasan (nilai budaya &amp; pentahelix)</li> <li>- Peningkatan kolaborasi multipihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan nilai toleransi dan anti-kekerasan melalui kegiatan budaya</li> <li>- Kolaborasi seniman, budayawan, komunitas, pemerintah, dan swasta dalam pelestarian budaya</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan penguatan kelembagaan inovasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan lembaga kebudayaan daerah sebagai pusat inovasi</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk inovasi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan HAKI atas karya seni, tradisi, dan budaya lokal</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan dan penguatan komunitas inovator lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan komunitas seni-budaya sebagai motor penggerak inovasi daerah</li> </ul>	
-	Pelestarian Warisan Budaya dan Tradisi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan regulasi dan kebijakan daerah pendukung kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan regulasi daerah tentang pelestarian warisan budaya &amp; tradisi</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pelestarian nilai budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan keluarga, komunitas adat, dan tokoh masyarakat dalam pewarisan nilai budaya</li> </ul>	
-	Fasilitasi kegiatan seni budaya berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan literasi inovasi dan teknologi bagi masyarakat</li> <li>- Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi inovatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisasi seni budaya dan promosi berbasis teknologi</li> <li>- Pelatihan seniman dan pelaku budaya dalam pengembangan kompetensi kreatif</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>Sektor Kepemudaan</b>			
-	Penguatan kapasitas pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesional pendidik</li> <li>- Mendorong penguatan dan revitalisasi pendidikan vokasi dan keterampilan kerja pada jenjang pendidikan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan pelatihan digital dan e-learning untuk pengembangan kapasitas pemuda (edutech, kepemimpinan virtual, kolaborasi pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal di sekolah dan luar sekolah</li> </ul>	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
	- Fasilitasi organisasi kepemudaan berjejaring nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)</li> <li>- Peningkatan literasi inovasi dan teknologi bagi ASN dan</li> <li>- Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi inovatif</li> <li>- Pembentukan dan penguatan komunitas inovator lokal</li> <li>- Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>- Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum</li> <li>- Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan</li> <li>- Pembentukan dan optimalisasi forum koordinasi lintas sektor</li> <li>- Peningkatan sistem pelaporan dan pengaduan kekerasan yang mudah diakses dan responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong MoU antara SMK/lembaga pelatihan dengan dunia usaha lokal dan regional</li> <li>- Workshop digital skill, creative thinking, dan inkubasi gagasan inovatif pemuda</li> <li>- Bootcamp kepemudaan, pelatihan wirausaha pemuda, pelatihan kepemimpinan berjenjang</li> <li>- Fasilitasi pembentukan komunitas/jejaring pemuda kreatif, techno-preneur, pemuda tangguh</li> <li>- Mendorong keterlibatan organisasi pemuda dalam forum-forum kewaspadaan dini dan penanggulangan</li> <li>- Kampanye damai, literasi digital antihoaks, dan kegiatan sosial kolaboratif oleh organisasi pemuda</li> <li>- Optimalisasi forum pemuda lintas agama, gender, dan wilayah dalam menjaga harmoni sosial</li> <li>- Dukungan kepada Forum Pemuda Daerah, Forum OSIS, Karang Taruna, dan Forum Pelajar/Remaja untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program kepemudaan</li> <li>- Edukasi sistem pelaporan kekerasan berbasis digital (aplikasi, hotline), serta pembentukan agen perubahan pemuda (peer-to-peer educator)</li> </ul>	
5	<b>Sektor Olahraga</b> - Pembinaan dan pengembangan olahraga berjenjang  - Penyelenggaraan kompetisi daerah dan pembinaan prestasi  - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi inovatif</li> <li>- Peningkatan literasi inovasi dan teknologi bagi ASN dan masyarakat</li> <li>- Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum</li> <li>- Peningkatan kampanye dan edukasi publik tentang pencegahan kekerasan</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih, wasit, instruktur olahraga serta peningkatan manajemen klub olahraga</li> <li>- Integrasi teknologi dalam pembinaan atlet muda (sports science, digital tracking, e-coaching, dsb.)</li> <li>- Membangun budaya sportifitas, fair play, dan antikekerasan dalam olahraga sejak dini</li> <li>- Kampanye anti-kekerasan dalam olahraga (khususnya usia muda), serta pelibatan orang tua dan sekolah dalam program edukatif</li> <li>- Revitalisasi lapangan olahraga desa, pembangunan GOR mini, perbaikan lintasan atletik, pengadaan alat latihan</li> </ul>	
>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Urusan</b>			
	- Penyusunan dokumen perencanaan sesuai SPM	- Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	- Menyusun dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, RKA, dll) berbasis hasil evaluasi kinerja serta	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja</li> <li>- Penguatan perencanaan kebutuhan ASN yang tepat dan berbasis data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program/kegiatan (IKP), serta sinkronisasi dengan indikator nasional, provinsi, dan kabupaten</li> <li>- Menyusun Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), serta Formasi ASN sesuai kebutuhan riil unit kerja bidang sektor wisata, budaya, pemuda, olahraga</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan evaluasi kinerja urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan sistem pengembangan karier dan pola mutasi ASN</li> <li>- Digitalisasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja ASN</li> <li>- Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD secara sistematis dan terstruktur</li> <li>- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi</li> <li>- Penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi</li> <li>- Pengembangan sistem penilaian kinerja yang terukur dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi merit system, manajemen talenta ASN, dan pola karier berbasis kompetensi teknis sektor</li> <li>- Menerapkan aplikasi perencanaan berbasis e-performance (e-SAKIP), e-Renja, e-RKPD, serta integrasi dengan SIPD Kemendagri</li> <li>- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) setiap akhir tahun dengan konsisten dan terukur</li> <li>- Menetapkan instrumen evaluasi kinerja bidang/sub-bidang dan melakukan penilaian kinerja triwulan, semester, dan tahunan secara sistematis</li> <li>- Implementasi dashboard monev berbasis aplikasi (online) yang mencatat realisasi kinerja dan anggaran masing-masing program/kegiatan</li> <li>- Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 1 sistem data (single platform)</li> <li>- Mengembangkan skema KPI (Key Performance Indicator) per bidang dan reward/punishment internal organisasi berdasarkan pencapaian target kinerja</li> </ul>	



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### **4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, seluruh dokumen perencanaan disusun secara berjenjang dan terintegrasi, dengan mengacu pada prinsip result-based planning atau perencanaan berbasis hasil. Pendekatan ini bertujuan agar setiap intervensi pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui pendekatan ini pula, setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas dari level strategis hingga operasional.

Sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kab. Tanjab Barat menjadi dasar utama dalam perumusan tujuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Tujuan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Dengan demikian, keterkaitan vertikal antara perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah tetap terjaga dan dapat diukur secara sistematis.

Selanjutnya, tujuan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dijabarkan lagi menjadi sasaran perangkat daerah, yang memiliki indikator kinerja berupa outcome. Outcome merupakan hasil antara (intermediate result) yang mencerminkan dampak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk memastikan ketercapaian outcome, maka disusunlah program-program yang bersifat strategis dan relevan dengan sasaran perangkat daerah. Program ini kemudian dijabarkan ke dalam output, yaitu hasil konkret yang dapat dicapai dalam jangka pendek melalui kegiatan dan sub-kegiatan.

Kegiatan dan sub-kegiatan merupakan komponen pelaksana dari program, dan bersifat teknis operasional. Setiap kegiatan harus dapat mendukung capaian output secara nyata, baik berupa produk fisik, layanan, dokumen, atau capaian kinerja lainnya. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang utuh antara sasaran RPJMD, tujuan Perangkat Daerah, sasaran Perangkat Daerah (outcome) yang didukung program dan output



didukung kegiatan, sehingga seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Rumusan program dan kegiatan Renstra Dinas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan Kemendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>NSPK : Sektor pariwisata, ekraf, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan</b>  <b>&gt; Sektor Pariwisata</b> - Pengelolaan & Pengembangan Destinasi - Pengembangan SDM & Kelembagaan Pariwisata - Pengelolaan Pemasaran Pariwisata  <b>&gt; Sektor Ekraf</b> - Pengembangan SDM Ekraf melalui pelatihan dan - Penguatan akses pemasaran & pembiayaan produk ekraf - Pengembangan ekosistem kelembagaan ekraf lokal  <b>&gt; Sektor Kebudayaan</b>	Mengintegrasikan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, dan pembinaan olahraga dalam satu ekosistem strategis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik yang adaptif, serta ekonomi daerah yang inklusif dan merata				- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB - Persentase pelaku ekraf yang aktif memasarkan produk secara digital - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Jumlah organisasi pemuda - Jumlah prestasi olahraga		
		<i>Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik</i>			<i>Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman)</i>		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA</b>	
				Terkelolanya daya tarik wisata kabupaten/kota secara optimal melalui peningkatan sarana, prasarana, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan atraksi wisata	Jumlah event pendukung daya tarik destinasi	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan event pada daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik kunjungan wisatawan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota secara terpadu melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan fungsi kawasan sebagai destinasi unggulan	Jumlah Kawasan Destinasi yang dikelola/terpelihara	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai melalui kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten/kota secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas	Jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan</li> <li>- Pelestarian Warisan Budaya dan Tradisi</li> <li>- Fasilitasi kegiatan seni budaya berkelanjutan</li> </ul> <p>&gt; <b>Sektor Kebpemudaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kapasitas pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan, dan sosial</li> <li>- Fasilitasi organisasi kepemudaan berjejaring nasional</li> </ul> <p>&gt; <b>Sektor Olahraga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pengembangan olahraga berjenjang</li> <li>- Penyelenggaraan kompetisi daerah dan pembinaan prestasi</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>				<p><b>layanan, penataan kawasan, dan penguatan kapasitas pengelolaan destinasi</b></p> <p>Meningkatnya peran serta dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota melalui kegiatan pemberdayaan dan pendampingan</p> <p>Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) sebagai acuan perencanaan dan pengembangan pariwisata kabupaten/kota secara terarah dan berkelanjutan</p> <p><b>Terlaksananya pendampingan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) bagi pelaku usaha pariwisata di kabupaten/kota sebagai bentuk legalitas dan penguatan tata kelola usaha pariwisata daerah</b></p> <p>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata risiko menengah rendah guna memastikan kepatuhan terhadap standar usaha yang</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Jumlah kegiatan sosialisasi/pertemuan terkait TDUP</b></p> <p>Jumlah usaha yang dibina dan diawasi</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko</p>	
				<b>Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata</b>	<b>Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	
				<b>Terlaksananya kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan promosi daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Promosi</b>	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya fasilitasi terhadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam kegiatan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri guna mendukung peningkatan promosi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan promosi pariwisata kabupaten/kota melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan awareness dan minat kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
					<b>Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/incubasi</b>		
		<b>Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif lokal</b>					



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<div>&gt; <b>Kinerja Penyelenggaraan Urusan</b></div> <div><div><div>- Penyusunan dokumen perencanaan sesuai SPM</div><div>- Pelaksanaan evaluasi kinerja urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga</div></div></div> <div><b>Sasaran RPJMD yang Relevan :</b><div><div><div>- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah</div><div>- Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran</div><div>- Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal</div><div>- Kemandirian desa secara berkelanjutan</div><div>- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah Daerah</div></div></div></div>			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase pelaku ekraf yang memiliki kelayakan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Tersedianya prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang berpartisipasi di ruang kreatif	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) Sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terwujudnya pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif yang mendukung aktivitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Terbangunnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlah produk ekraf yang dipasarkan	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Tersedianya Infrstruktur Ekraf yang tersedia	Jumlah Infrstruktur Ekraf yang tersedia	Penyediaan infrastruktur	
				Terbangunnya sistem pemasaran yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung promosi dan penjualan produk pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	
				Terlaksananya fasilitasi penguatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah kabupaten	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tingkat dasar di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terlaksananya fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan di daerah kabupaten	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pariwisata untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia di kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Seni dan Budaya			Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat		
		- Meningkatnya karya budaya			Jumlah penampilan karya budaya		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan pembinaan SDM kesenian tradisional yang mendorong keterlibatan generasi muda serta keberlanjutan pagelaran seni daerah	Jumlah kegiatan pelatihan/pembinaan SDM	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Terlaporkannya peningkatan jumlah kegiatan pembinaan terhadap sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional di Kabupaten secara sistematis dan berkelanjutan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Meningkatnya jumlah komunitas adat yang terlibat dalam kegiatan pembinaan lembaga adat di wilayah Kabupaten	Jumlah komunitas adat terlibat dalam pembinaan	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di wilayah Kabupaten	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pembinaan adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengembangan kesenian tradisional		Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang diselenggarakan dan diikuti oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan adat di wilayah Kabupaten	Jumlah kegiatan pendidikan/pelatihan SDM yang diikuti/diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas bidang seni, budaya, dan adat	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi di wilayah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang sejarah lokal yang diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas pelaku dan pengelola sejarah di wilayah Kabupaten	Jumlah kegiatan pelatihan/pembinaan SDM sejarah	Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal yang diberdayakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan sejarah daerah di wilayah Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai upaya memperluas pemahaman dan apresiasi terhadap sejarah lokal di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		- Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Meningkatnya jumlah kegiatan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota sebagai upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya daerah	Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan sebagai langkah awal perlindungan dan pelestarian warisan budaya di wilayah Kabupaten	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
				Meningkatnya jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan secara resmi di wilayah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya daerah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.			Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya jumlah dan jenis pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, serta pemuda kader di wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah dan jenis pelatihan/kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi serta penyusunan dan implementasi program di tingkat Kabupaten	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya jumlah wirausaha muda tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
				Meningkatnya jumlah pemuda pelopor tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh wilayah yang difasilitasi dalam kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan program secara terpadu	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Meningkatnya jumlah prasarana kepemudaan yang tersedia dan dikelola di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung aktivitas dan pengembangan potensi generasi muda	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota setelah memperoleh fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan setelah difasilitasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Meningkatnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kepramukaan sebagai hasil dari pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di wilayah Kabupaten	Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Meningkatnya jumlah sumber daya manusia kepramukaan di tingkat daerah yang mengalami peningkatan kapasitas melalui pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
				Meningkatnya jumlah laporan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di tingkat daerah sebagai bukti pelaksanaan program kepramukaan secara aktif dan terorganisir	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
				Tertindakannya Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah yang terkelola dan dimanfaatkan	Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.		Jumlah atlet berprestasi		
			Meningkatnya Pembudayaan Olahraga dan Prestasi Olahraga		Persentase Atlet yang Ikut Kejuaraan Tk Prov, regional dan Nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang difasilitasi dalam pembinaan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi dalam pembinaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di tingkat Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan tingkat kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga serta penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar di tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				<b>Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang menghasilkan sejumlah atlet berprestasi sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan</b>	<b>Jumlah Atlet Berprestasi</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terselenggaranya kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jumlah dan jenis kejuaraan yang direncanakan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tertelaksananya keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dengan jumlah peserta sesuai target dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				<b>Tertelaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi melalui pemberian penghargaan kepada sejumlah cabang olahraga berprestasi</b>	<b>Jumlah Cabang Olahraga yang Menerima Penghargaan</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	
				Terealisasi pemberian penghargaan olahraga kepada individu dan/atau pihak yang berprestasi dan berjasa dalam memajukan olahraga, sesuai dengan jumlah penerima yang ditetapkan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
				Tertelaksananya pembinaan dan pengembangan bagi sejumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota guna meningkatkan kemampuan dan prestasi secara berkelanjutan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Tersusunnya dokumen penyediaan data keolahragaan terpadu kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang olahraga	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu kabupaten/kota	Pembentukan dan Penyediaan sistem data kabupaten/kota	
				<b>Terselenggaranya sejumlah kegiatan olahraga rekreasi sebagai upaya pembinaan dan pengembangan minat masyarakat terhadap aktivitas fisik yang sehat</b>	<b>Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang diselenggarakan</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	
				Tersusunnya dokumen lembaga hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan, dan petualangan sebagai bentuk pengembangan dan pendokumentasian kegiatan olahraga berbasis wisata dan minat khusus	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata			Persentase Ketercapaian Target Strategis Sektor Pariwisata, Ekraf, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
			Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SAKIP</li> <li>- Nilai IKM</li> <li>- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan</li> </ul>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah dan terukur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai target jumlah yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD beserta laporan hasil koordinasi penyusunannya sesuai dengan jumlah dan jadwal yang ditetapkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan jumlah yang ditargetkan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode pelaporan yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai standar sebagai hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntabel dan terdokumentasinya hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran SKPD serta terdokumentasinya hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan secara tertib, akurat, dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<b>Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan mengikuti pelatihan/bimtek dari total pegawai yang berhak</b>	<b>Tersedianya fasilitas atau kelengkapan yang mendukung kinerja pegawai</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sesuai jumlah kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan operasional</b>	<b>Frekuensi Tersedianya Adm. Umum</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya paket bahan logistik kantor secara memadai untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan untuk mendukung dokumentasi dan komunikasi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung kebutuhan informasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara lengkap dan tepat waktu untuk mendukung sinergi antar perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Tersedianya data dan laporan jumlah total Barang Milik Daerah (BMD)</b>	<b>Jumlah Total BMD</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pejabat yang berwenang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya guna mendukung efektivitas dan efisiensi operasional perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<b>Tersusunnya laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran administrasi dan komunikasi kedinasan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik sebagai dukungan terhadap keberlangsungan operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran administrasi dan operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkelanjutan guna menjamin keberfungsian aset dalam mendukung urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tertersedianya pemeliharaan dan pembayaran pajak terhadap sejumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tertersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan jumlah peralatan dan mesin yang telah ditetapkan untuk dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tertersedianya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bunganan Lainnya	



#### **4.2 Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merumuskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah, konsisten, dan berbasis pada hasil. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, outcome, output, dan input, guna memastikan bahwa pelaksanaan program mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Setiap program dan kegiatan disusun mengacu pada dokumen perencanaan strategis dan tahunan, seperti Renstra dan Renja, serta mengikuti klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman sistem informasi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan juga disusun secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan rencana program/kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perencanaan ini menjadi instrumen penting dalam pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga secara terukur dan mendukung perwujudan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:



**Tabel 4.2**  
**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	15%	15%	826.993.000	16%	1.709.142.300	17%	2.850.056.530	18%	2.680.062.183	19%	2.810.068.401	19%	2.810.068.401	
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pendukung daya tarik destinasi Kabupaten/Kota	4 Event	4 Event	826.493.000	4 Event	909.142.300	4 Event	1.000.056.530	4 Event	1.100.062.183	4 Event	1.210.068.401	4 Event	1.210.068.401	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	826.493.000	2 Lokasi	909.142.300	2 Lokasi	1.000.056.530	2 Lokasi	1.100.062.183	2 Lokasi	1.210.068.401	2 Lokasi	1.210.068.401	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Destinasi yang dikelola/terpelihara	3 Kawasan	1 Kawasan	500.000	1 Kawasan	800.000.000	2 Kawasan	800.000.000	1 Kawasan	1.000.000.000	2 Kawasan	1.000.000.000	2 Kawasan	1.000.000.000	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit		500.000	3 Unit	800.000.000	3 Unit	800.000.000	4 Unit	1.000.000.000	4 Unit	1.000.000.000	4 Unit	1.000.000.000	
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata						30 Orang	650.000.000	30 Orang	180.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	180.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota						1 Dokumen	500.000.000							
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi/pertemuan terkait TDUP						3 kegiatan	400.000.000	3 kegiatan	400.000.000	3 kegiatan	400.000.000	3 kegiatan	400.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi						77 Pelaku Usaha	400.000.000	77 Pelaku Usaha	400.000.000	77 Pelaku Usaha	400.000.000	77 Pelaku Usaha	400.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran	3%	5%	379.624.000	5,5%	417.586.400	6%	659.345.040	7%	725.279.544	8%	797.807.498	8%	797.807.498	
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	3 Media	2 Kegiatan	379.624.000	3 Kegiatan	417.586.400	3 Kegiatan	659.345.040	3 Kegiatan	725.279.544	3 Kegiatan	797.807.498	3 Kegiatan	797.807.498	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	379.624.000	2 Kegiatan	417.586.400	2 Kegiatan	459.345.040	2 Kegiatan	505.279.544	2 Kegiatan	555.807.498	2 Kegiatan	555.807.498	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	242.000.000	2 Dokumen	242.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekraf yang memiliki kelayakan intelektual	2%	4%	894.160.000	4%	1.233.576.000	5%	1.906.933.600	5%	2.097.626.960	5%	2.307.389.656	5%	2.307.389.656	
Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang berpartisipasi di ruang kreatif	4 Sub Sektor	4 Sub Sektor	894.160.000	4 Sub Sektor	983.576.000	4 Sub Sektor	1.081.933.600	4 Sub Sektor	1.190.126.960	4 Sub Sektor	1.309.139.656	4 Sub Sektor	1.309.139.656	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit	894.160.000	2 Unit	983.576.000	2 Unit	1.081.933.600	2 Unit	1.190.126.960	2 Unit	1.309.139.656	2 Unit	1.309.139.656	
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekraf yang dipasarkan					250.000.000	6 produk	825.000.000	6 produk	907.500.000	6 produk	998.250.000	6 produk	998.250.000	
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif						3 Dokumen	375.000.000	3 Dokumen	412.500.000	3 Dokumen	453.750.000	3 Dokumen	453.750.000	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	450.000.000	3 Kegiatan	495.000.000	3 Kegiatan	544.500.000	3 Kegiatan	544.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	4%	5%	102.932.000	5%	500.000.000	6%	1.350.000.000	6%	1.402.500.000	7%	1.462.875.000	7%	1.462.875.000	
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi - Jumlah pelaku ekonomi kreatif formal dan informal			102.932.000	1 Sub Sektor 60 Orang	500.000.000	4 Sub Sektor 240 Orang	1.350.000.000	4 Sub Sektor 240 Orang	1.402.500.000	4 Sub Sektor 240 Orang	1.462.875.000	4 Sub Sektor 240 Orang	1.462.875.000	
Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	30 Orang	0	1.810.000	60 Orang	250.000.000	240 Orang	1.000.000.000	240 Orang	1.000.000.000	240 Orang	1.000.000.000	240 Orang	1.000.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja	21 Orang	25 Orang	101.122.000	50 Orang	250.000.000	80 Orang	350.000.000	80 Orang	402.500.000	80 Orang	462.875.000	80 Orang	462.875.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan				2,1%	3.120.000.000	2,2%	3.220.000.000	2,3%	3.120.000.000	2,4%	3.220.000.000	2,4%	3.220.000.000	
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan pelatihan/pembinaan SDM - Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya		3 kali	-	20 Kali 4 kali	2.150.000.000	20 Kali 5 kali	2.150.000.000	20 Kali 5 kali	2.150.000.000	20 Kali	2.150.000.000	20 Kali	2.150.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	1.800.000.000	5 Objek	1.800.000.000	5 Objek	1.800.000.000	5 Objek	1.800.000.000	5 Objek	1.800.000.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas adat terlibat dalam pembinaan				12 Komunitas	970.000.000	20 Kali	1.070.000.000	20 Kali	970.000.000	20 Kali	1.070.000.000	20 Kali	1.070.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek	850.000.000	12 Objek	850.000.000	12 Objek	850.000.000	12 Objek	850.000.000	12 Objek	850.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	120.000.000	1 Unit	220.000.000	5 Unit	120.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	220.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan				50%	600.000.000	50%	650.000.000	50%	700.000.000	50%	750.000.000	50%	750.000.000	
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan/pelatihan SDM yang diikuti/diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas bidang seni, budaya, dan adat				2 Kegiatan	600.000.000	2 Kegiatan	650.000.000	2 Kegiatan	700.000.000	2 Kegiatan	750.000.000	2 Kegiatan	750.000.000	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	600.000.000	30 Orang	650.000.000	30 Orang	700.000.000	30 Orang	750.000.000	30 Orang	750.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal				5%	150.000.000	5,1%	150.000.000	5,2%	350.000.000	5,3%	350.000.000	5,3%	350.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan/pembinaan SDM sejarah				1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat								2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan			50%	150.000.000	50%	300.000.000	50%	300.000.000	50%	300.000.000	50%	300.000.000	50%	300.000.000
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			1 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000
	- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			25%		25%		25%		25%		25%		25%	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan					2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000	2 Objek	150.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	34,50%	34,5%	464.079.600	35%	1.962.667.400	35,5%	1.447.203.900	36%	1.484.328.930	36,5%	1.948.868.783	36,5%	1.948.868.783	
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah wirausaha pemuda mandiri		50 Orang	464.079.600	50 Orang	1.762.667.400	50 Orang	1.047.203.900	50 Orang	884.328.930	50 Orang	1.148.868.783	50 Orang	1.148.868.783	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota					1 dokumen	350.000.000								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	364 Orang	21 Orang	130.449.600	40 Orang	195.674.400	70 Orang	293.511.600	100 Orang	440.267.400	120 Orang	660.401.100	120 Orang	660.401.100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	26 Orang	26 Orang	333.630.000	26 Orang	366.993.000	26 Orang	403.692.300	26 Orang	444.061.530	26 Orang	488.467.683	26 Orang	488.467.683	
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			1 Unit	1.200.000.000										
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi				200.000.000		400.000.000		600.000.000		800.000.000		800.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			1 Organisasi	200.000.000	2 Organisasi	400.000.000	3 Organisasi	600.000.000	4 Organisasi	800.000.000	4 Organisasi	800.000.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	39%	43,5%	500.000.000	43,5%	1.400.000.000	44%	1.540.000.000	44%	1.694.000.000	44,5%	1.863.400.000	44,5%	1.863.400.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kepramukaan		25%	500.000.000	25%	1.400.000.000	30%	1.540.000.000	30%	1.694.000.000	35%	1.863.400.000	35%	1.863.400.000	
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	107 Orang			40 Orang	200.000.000	40 Orang	220.000.000	40 Orang	242.000.000	40 Orang	266.200.000	40 Orang	266.200.000	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 laporan	500.000.000	1 laporan	1.200.000.000	1 laporan	1.320.000.000	1 laporan	1.452.000.000	1 laporan	1.597.200.000	1 laporan	1.597.200.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Ikut Kejuaraan Tk Prov, regional dan Nasional	24%	25%	14.601.918.200	35%	25.795.324.974	25%	21.873.990.248	25%	23.265.057.498	35%	35.580.096.697	35%	35.580.096.697	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda	74%	60%	6.003.271.700	65%	7.203.926.040	70%	8.944.711.248	75%	10.673.653.498	75%	12.748.384.197	75%	12.748.384.197	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET															KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	22 Unit	13 Sapras	6.003.271.700	15 Sapras	7.203.926.040	15 Sapras	8.644.711.248	20 Sapras	10.373.653.498	22 Sapras	12.448.384.197	22 Sapras	12.448.384.197				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000				
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	97%	97%	1.473.646.500	97%	8.753.898.934	97%	3.058.029.000	97%	2.358.029.000	97%	10.400.000.000	97%	10.400.000.000				
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.256.500	1 Kegiatan	753.898.934	2 Kegiatan	1.500.000.000	1 Kegiatan	800.000.000	2 Kegiatan	1.600.000.000	2 Kegiatan	1.600.000.000				
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	227 Orang	220 Orang	1.416.390.000	450 Orang	8.000.000.000	220 Orang	1.558.029.000	220 Orang	1.558.029.000	450 Orang	8.800.000.000	450 Orang	8.800.000.000				
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	6.445.000.000	100%	9.089.500.000	100%	9.048.450.000	100%	9.328.295.000	100%	11.436.124.500	100%	11.436.124.500				
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	132 Orang			270 Orang	2.000.000.000	50 Orang	750.000.000	50 Orang	750.000.000	270 Orang	2.000.000.000	270 Orang	2.000.000.000				
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	50 Orang	6.445.000.000	300 Orang	7.089.500.000	70 Orang	7.798.450.000	70 Orang	8.578.295.000	300 Orang	9.436.124.500	300 Orang	9.436.124.500				
Pembentukan dan Penyediaan sistem data kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu kabupaten/kota						1 dokumen	500.000.000										
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang diselenggarakan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	680.000.000	7 Kegiatan	748.000.000	7 Kegiatan	822.800.000	7 Kegiatan	905.080.000	7 Kegiatan	995.588.000	7 Kegiatan	995.588.000				
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000	1 Dokumen	748.000.000	1 Dokumen	822.800.000	1 Dokumen	905.080.000	1 Dokumen	995.588.000	1 Dokumen	995.588.000				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Nilai SAKIP	85	85		85,5		86		86,5		87		87					
	- Nilai IKM	93,69	93	5.259.177.087,00	93,5	6.463.704.795,70	94	6.493.545.275,27	94,5	7.269.319.802,80	95	7.820.271.783,08	95	7.820.271.783,08				
	- Persentase Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		75%		77%		80%		82%		85%		85%					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dokumen / Laporan	40 Dokumen / Laporan	221.734.200	40 Dokumen / Laporan	243.907.620	40 Dokumen / Laporan	268.298.382	40 Dokumen / Laporan	295.128.220	40 Dokumen / Laporan	324.641.042	40 Dokumen / Laporan	324.641.042				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	108.677.800	9 Dokumen	119.545.580	9 Dokumen	131.500.138	9 Dokumen	144.650.152	9 Dokumen	159.115.167	9 Dokumen	159.115.167				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	77.333.200	18 Laporan	85.066.520	18 Laporan	93.573.172	18 Laporan	102.930.489	18 Laporan	113.223.538	18 Laporan	113.223.538				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	35.723.200	13 Laporan	39.295.520	13 Laporan	43.225.072	13 Laporan	47.547.579	13 Laporan	52.302.337	13 Laporan	52.302.337				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3.521.987.312	3 Laporan	3.874.186.043	3 Laporan	4.261.604.648	3 Laporan	4.687.765.112	3 Laporan	5.156.541.623	3 Laporan	5.156.541.623				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	14 Orang / Bulan	2.329.055.312	14 Orang / Bulan	2.561.960.843	14 Orang / Bulan	2.818.156.928	14 Orang / Bulan	3.099.972.620	14 Orang / Bulan	3.409.969.882	14 Orang / Bulan	3.409.969.882				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.186.080.000	12 Dokumen	1.304.688.000	12 Dokumen	1.435.156.800	12 Dokumen	1.578.672.480	12 Dokumen	1.736.539.728	12 Dokumen	1.736.539.728				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.362.000	1 Laporan	3.698.200	1 Laporan	4.068.020	1 Laporan	4.474.822	1 Laporan	4.922.304	1 Laporan	4.922.304				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	3.490.000	1 Laporan	3.839.000	1 Laporan	4.222.900	1 Laporan	4.645.190	1 Laporan	5.109.709	1 Laporan	5.109.709				



BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas atau kelengkapan yang mendukung kinerja pegawai	3 paket	1 Paket	37.900.000	2 Paket	125.800.000	2 Paket	125.800.000	2 Paket	125.800.000	2 Paket	125.800.000	2 Paket	125.800.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	1 Paket	37.900.000	2 Paket	75.800.000	2 Paket	75.800.000	2 Paket	75.800.000	2 Paket	75.800.000	2 Paket	75.800.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	50.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi Tersedianya Adm. Umum	12 Bulan	12 Bulan	882.428.000,00	12 Bulan	970.670.800,00	12 Bulan	1.067.737.880,00	12 Bulan	1.174.511.668,00	12 Bulan	1.291.962.834,80	12 Bulan	1.291.962.834,80		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10 Paket	10 Paket	14.573.000,00	10 Paket	16.030.300	10 Paket	17.633.330	10 Paket	19.396.663	10 Paket	21.336.329	10 Paket	21.336.329		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	83.540.000,00	12 Paket	91.894.000	12 Paket	101.083.400	12 Paket	111.191.740	12 Paket	122.310.914	12 Paket	122.310.914		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	12 Paket	88.504.000	12 Paket	97.354.400	12 Paket	107.089.840	12 Paket	117.798.824	12 Paket	129.578.706	12 Paket	129.578.706		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	54.900.000,00	4 Paket	60.390.000	4 Paket	66.429.000	4 Paket	73.071.900	4 Paket	80.379.090	4 Paket	80.379.090		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	5 Dokumen	8.800.000	5 Dokumen	9.680.000	5 Dokumen	10.648.000	5 Dokumen	11.712.800	5 Dokumen	11.712.800		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	632.911.000,00	12 Laporan	696.202.100	12 Laporan	765.822.310	12 Laporan	842.404.541	12 Laporan	926.644.995	12 Laporan	926.644.995		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Total BMD	19 Unit	-	-	-	594.500.000	-	50.000.000	-	194.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit			4 unit	144.000.000			4 unit	144.000.000						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit			35 Unit	450.500.000	4 unit	50.000.000	5	50.000.000	4 unit	50.000.000	4 unit	50.000.000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD	36 Laporan	36 Laporan	170.931.575	36 Laporan	188.024.733	36 Laporan	206.827.206	36 Laporan	227.509.926,33	36 Laporan	250.260.918,96	36 Laporan	250.260.918,96		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.400.000	12 Laporan	2.640.000	12 Laporan	2.904.000	12 Laporan	3.194.400	12 Laporan	3.513.840	12 Laporan	3.513.840		
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	137.740.000	13 Laporan	151.514.000	13 Laporan	166.665.400	13 Laporan	183.331.940	13 Laporan	201.665.134	13 Laporan	201.665.134		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.791.575	12 Laporan	33.870.733	12 Laporan	37.257.806	12 Laporan	40.983.586	12 Laporan	45.081.945	12 Laporan	45.081.945		
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan	12 bulan	12 Bulan	424.196.000,00	12 Bulan	466.615.600,00	12 Bulan	513.277.160,00	12 Bulan	564.604.876,00	12 Bulan	621.065.363,60	12 Bulan	621.065.363,60		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Kendaraan	14 Kendaraan	179.730.000,00	14 Kendaraan	197.703.000	14 Kendaraan	217.473.300	14 Kendaraan	239.220.630	14 Kendaraan	263.142.693	14 Kendaraan	263.142.693		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	24 Unit	25.790.000,00	24 Unit	28.369.000	24 Unit	31.205.900	24 Unit	34.326.490	24 Unit	37.759.139	24 Unit	37.759.139		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	218.676.000,00	1 Unit	240.543.600		264.597.960		291.057.756		320.163.532		320.163.532		
JUMLAH				23.028.883.887		43.502.001.870		42.441.074.593		45.088.174.917		59.210.777.819		59.210.777.819		



#### **4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Perioritas Pemerintah daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun sejumlah sub kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan mendorong peningkatan kinerja pembangunan di sektor unggulan. Sub kegiatan prioritas ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pemilihan sub kegiatan prioritas dilakukan melalui proses identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sub kegiatan tersebut mencakup antara lain: pelaksanaan festival budaya daerah sebagai bagian dari penguatan identitas lokal dan daya tarik wisata; fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk pelatihan dan akses promosi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif; serta pengembangan sarana dan pembinaan olahraga yang bertujuan meningkatkan partisipasi generasi muda serta prestasi olahraga daerah.

Setiap sub kegiatan yang masuk dalam kategori prioritas didesain untuk mendukung secara langsung pencapaian outcome dari program prioritas daerah, seperti peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekraf terhadap PDRB, peningkatan indeks pembangunan kebudayaan, serta peningkatan indeks kepemudaan dan prestasi olahraga. Sub kegiatan ini juga diarahkan untuk menghasilkan output yang konkret dan terukur, serta dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berjalan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pendanaan.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan prioritas secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan kinerja perangkat daerah tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sub kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjabarkan kebijakan kepala daerah ke dalam aksi nyata di lapangan, sesuai dengan pendekatan perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka sub kegiatan prioritas untuk program prioritas Pemerintah Daerah pada tabel 4.3 berikut:



**TABEL 4.4**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	BIDANG
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	PARIWISATA
			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	BIDANG
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	PARIWISATA
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	BIDANG PARIWISATA
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	BIDANG
2	PROGRAM PEMASARAN	Meningkatnya jangkauan pemasaran	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko	PARIWISATA
			Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	BIDANG
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PARIWISATA
			Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi,	BIDANG
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	BIDANG EKRAF
			Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Sistem Pemasaran	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	BIDANG EKRAF
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	
			Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	BIDANG KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Kabupaten/Kota	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	BIDANG KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	BIDANG
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masy dlm pengembangan kesenian tradisional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	BIDANG
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	KEBUDAYAAN



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	BIDANG KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	BIDANG KEBUDAYAAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	BIDANG PORA BID. SAPRAS BIDANG PORA
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	BIDANG PORA
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pembudayaan Olahraga dan Prestasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Pembentukan dan Penyediaan sistem data kabupaten/kota Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	BIDANG PORA BIDANG PORA BIDANG PORA BIDANG PORA



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan yang effesiensi dan	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BIDANG SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bubungan Lainnya	



#### **4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, IKU berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Penetapan IKU dilakukan berdasarkan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga indikator yang ditetapkan benar-benar menggambarkan kinerja yang dapat diukur secara objektif.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), IKU menjadi elemen penghubung antara visi-misi kepala daerah dan pelaksanaan program secara teknis di tingkat perangkat daerah. IKU memuat indikator pada level outcome, yang mencerminkan hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah. Oleh karena itu, keberadaan IKU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja dan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, untuk memberikan arah yang jelas dan konsisten terhadap pencapaian kinerja, setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dilengkapi dengan target capaian yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan. Penetapan target jangka menengah ini bertujuan agar perangkat daerah memiliki gambaran yang terukur dan terarah mengenai progres yang harus dicapai dalam periode RPJMD. Target lima tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian secara kumulatif, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan tahunan serta melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

Dengan adanya target jangka menengah yang jelas, perencanaan program dan kegiatan dapat diarahkan secara lebih fokus untuk mencapai outcome yang signifikan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Target-target tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kapasitas pelaksanaan, serta dinamika lingkungan strategis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Seluruh proses penetapan target ini mengedepankan prinsip keterlibatan



stakeholder dan analisis data yang komprehensif, sehingga target yang dihasilkan tidak hanya ambisius, namun juga realistis dan dapat dicapai.

Dengan demikian, IKU dan target jangka menengah lima tahunan menjadi fondasi utama dalam mengarahkan perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (result-based planning), serta menjadi alat pengendalian manajemen kinerja yang efektif. Keberadaan IKU juga mendorong Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk lebih fokus pada hasil, bukan hanya pada serapan anggaran atau keluaran administratif. Melalui sistem pengukuran kinerja yang kuat dan terstandarisasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, dan mempercepat tercapainya sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, IKU beserta target lima tahunan ini memperkuat akuntabilitas, sinergi antar OPD, dan akselerasi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara menyeluruh, dimana dapat digambarkan sebagaimana tabel 4.4 berikut:



**TABEL 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman)	Orang	785.000	800.000	786.000	786.000	787.000	Pariwisata
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/inkubasi	%	20	23	25	27	29	Ekraf
3	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	%	30	31	32	33	33	Kebudayaan
4	Jumlah penampilan karya budaya	Kali	25	25	25	25	25	Kebudayaan
5	Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat	%	25	25	25	25	25	Pora
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	176	200	176	184	200	Pora



#### **4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program dan sasaran strategis perangkat daerah. IKK berfokus pada hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan operasional yang lebih spesifik dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur outcome pada tingkat program.

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap kegiatan harus memiliki IKK yang jelas dan terukur agar kinerja dapat dipantau secara efektif. Penetapan IKK ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan strategis.

Selain itu, untuk memberikan arah yang terukur dan berkelanjutan, setiap IKK juga dilengkapi dengan target capaian yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya mengikuti periode perencanaan lima tahunan sesuai RPJMD. Target ini berfungsi sebagai ukuran capaian output kumulatif yang harus dicapai dalam periode tersebut, sehingga memungkinkan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi berkala dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Target lima tahunan IKK juga membantu dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan kegiatan secara lebih tepat sasaran, serta menjamin bahwa hasil kegiatan dapat memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya IKK beserta target jangka menengah ini, pengelolaan kinerja di tingkat kegiatan menjadi lebih sistematis dan transparan. Hal ini juga memungkinkan perangkat daerah untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pelaksanaan kegiatan, serta melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Pada akhirnya, penerapan IKK yang didukung dengan target terukur akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan.

Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas parpora Kab. Tanjung Jabung Barat :



**TABEL 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat okupansi hotel di destinasi prioritas	%	70	85	75	75	80	
2	Jumlah event wisata yang diselenggarakan	Kegiatan	6	6	6	6	6	
3	Jumlah promosi destinasi wisata yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	3	
4	Jumlah pelaku ekraf yang mengikuti pelatihan/inkubasi	Orang	20%	20%	20%	20%	20%	
5	Jumlah pelatihan/inkubasi yang diselenggarakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	
6	Jumlah kegiatan pelibatan komunitas lokal yang dilaksanakan dalam pengelolaan dan promosi budaya	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
7	Jumlah kelompok seni budaya muda yang terbentuk dan aktif	Kelompok	5	5	5	5	5	
8	Tingkat partisipasi komunitas muda dalam kampanye promosi digital situs budaya	%	10%	15	20%	23%	25%	
9	Jumlah pemuda alumni pelatihan yang aktif berwirausaha	Orang	3	4	5	6	7	
10	Jumlah pemuda alumni pelatihan yang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat	Orang	3	3	3	3	3	
11	Jumlah pemuda alumni pelatihan yang memegang posisi kepemimpinan di komunitas atau organisasi	Orang	2	2	2	2	2	
12	Persentase peningkatan prestasi atlet binaan dibanding tahun sebelumnya	%	33%	40%	(-50%)	10%	42%	
13	Jumlah cabang olahraga yang menghasilkan prestasi	Cabor	20	30	25	25	32	
14	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Dibangun/Direhabilitasi	Unit	4	5	5	5	5	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan strategis, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, adaptif, dan terukur di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Penyusunan Renstra ini dilandaskan pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta memperhatikan berbagai dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara lokal maupun nasional.

Sebagai perangkat daerah yang menangani sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berperan penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang sehat, produktif, dan inklusif. Melalui Renstra ini, Disparpora menetapkan arah pembangunan yang lebih fokus dan terarah dengan memprioritaskan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, melestarikan nilai-nilai budaya daerah, membina generasi muda yang berdaya saing, serta memperkuat sistem pembinaan dan prestasi olahraga di berbagai level. Semua upaya tersebut dirancang dalam bingkai kolaboratif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Renstra ini juga memuat sistem manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based planning*) melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilengkapi dengan target capaian tahunan dan lima tahunan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. IKU dan IKK menjadi alat ukur dalam pelaporan kinerja, bahan evaluasi berkala, serta dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Pengelolaan kinerja yang baik juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien.



Sebagai penutup, Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan juga representasi dari tekad dan komitmen Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “Berkah Madani” sebuah visi yang mencerminkan harapan akan daerah yang Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, dan Harmonis, serta Mandiri dan Inovatif. Diharapkan, seluruh program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini dapat menjadi instrumen perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Renstra ini menjadi landasan untuk membangun masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera dalam naungan keberkahan dan nilai-nilai kemadaniannya.

Kuala Tungkal, 2025  
Plt. Kepala Dinas Parpora  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**H. ANGSORI, S.Ag., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197004141998031005



# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **2025-2029**

**DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TIM PERENCANAAN**

